



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**LAKIP 2024**

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN JEMBER**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2024.

Jember, 19 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Keluarga Berencana  
Kabupaten Jember



**POERWAHJOEDI, SE, MM**

NIP. 19690628 199303 1 006

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI .....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER .....	7
E. SARANA PRASARANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER .....	9
F. ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER.....	12
G. ISU STRATEGIS .....	15
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	17
A. RENCANA STRATEGIS .....	17
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	19
C. PERJANJIAN KINERJA 2024.....	21
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024 .....	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	24
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2024 .....	24

B. CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER.....	25
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN.....	28
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA .....	121
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN .....	122
F. REALISASI ANGGARAN .....	125
 BAB IV. PENUTUP. ....	 132

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026**
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024**
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**
- Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD**
- Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2024**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2024.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana ditahun 2024 ini mendapat predikat nilai sangat memuaskan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Keluarga di tahun 2024 ini mendapat predikat nilai sangat memuaskan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah di tahun 2024 ini mendapat predikat nilai sangat memuaskan.

Capaian 3 indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember rata rata mencapai 102 % dan masuk dalam kategori AA ( Sangat Memuaskan ). Dengan demikian maka secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2021 -2026.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 31.873.363.102,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember, DAK NON FISIK BOKB, DAK FISIK BOKB dan DAK BOPPA Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 30.735.159.502,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 1.138.203.600,-

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar anggaran sebesar Rp. . 31.873.363.102,- dan terserap sebesar Rp 29.731.875.732,- atau rata- rata capaian 93,28 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. SDM yang sangat berkurang

2. Masih rendahnya APBD untuk pelayanan KB
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember masih mengandalkan anggaran DAK dari Pusat.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Tim TAPD menambah anggaran APBD untuk pelayanan KB dan pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Penambahan SDM

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2024

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 19 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan ;
- (5) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember terdiri dari :
  - a. Sekreariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan terdiri atas kelompok jabatan fungsional ;
  - c. Bidang Perlindungan Anak terdiri atas kelompok jabatan fungsional ;
  - d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Pergerakan dan Informasi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional ;
  - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri atas kelompok jabatan fungsional ;
  - f. UPTD dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional

## Tugas dan Fungsi

### 1. Sekretariat :

Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, dan keuangan di lingkungan dinas.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, dan keuangan di lingkungan dinas.
- c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas.
- d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab dinas.
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### 2. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Tugas : merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender serta tugas lain dan yang diberikan oleh kepala dinas.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender.
- b. Perumusan pedoman teknis dan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender.
- c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender.

- d. Pelaksanaan parameter pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender
  - e. Menyusun system informasi data gender dan data terpilah.
  - f. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender.
  - g. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender.
  - h. Pelaksanaan pengembangan informasi dan edukasi tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender.
  - i. Pelaksanaan fasilitasi jejaring pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender.
  - j. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
3. Bidang Perlindungan Anak

Tugas : merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan hak anak.
- b. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan hak anak.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan hak anak.
- d. Penyediaan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan.
- e. Memfasilitasi kegiatan kabupaten layak anak.
- f. Memfasilitasi pembuatan profil anak desa / kelurahan dan kecamatan.
- g. Memfasilitasi pembentukan gugus tugas desa / kelurahan layak anak dan forum anak kecamatan.

- h. Memfasilitasi pembentukan gugus tugas kecamatan layak anak dan forum anak kecamatan.
  - i. Melaksanakan bimbingan teknis konvensi hak anak bagi lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha.
  - j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembentukan rumah ramah anak.
  - k. Pengelolaan system data anak lingkup kabupaten.
  - l. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembentukan pusat informasi sahabat anak.
  - m. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembentukan ruang bermain ramah anak.
  - n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi  
Tugas : melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi.
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi.
  - b. Perumusan pedoman teknis dan program pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi.
  - c. Pelaksanaan perumusan, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan advokasi, penggerakan dan informasi.
  - d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kreteria bidang pengendalian, penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi.
  - e. Pelaksanaan pengembangan desain program, koordinasi dan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi.
  - f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten jember dan pengendalian kualitas penduduk, pengelolaan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana.
  - g. Pelaksanaan bimbingan teknis monitoring, pelaporan serta evaluasi dan penyediaan data pelaksanaan kegiatan bi bidang pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi.
5. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Tugas : melaksanakan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera di tingkat kabupaten.

Fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera.
- b. Perumusan pedoman teknis dan program keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera.
- c. Pelaksanaan norma, standar, procedure dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera.
- d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi.
- e. Pelaksanaan sinkronisasi dan kegiatan jaringan keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera.
- f. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera
- g. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelayanan keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera
- h. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera.

#### 6. UPTD

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas, bertujuan untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

### **D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember yang dituangkan pada

Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 48 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 81 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 33 orang atau 40 %.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2024**

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P	
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMP	SMA	D3	S1			S2
Jabatan Pimpinan Tinggi	1				1		0								
Jabatan Administrasi	0						0								
1. Administrator	5				5		4					1	3	2	2
2. Pengawas	2				2		1					1		1	
3. Pelaksana	52		13	15	24		12	3		3	2	4		9	4
Jabatan Fungsional	21				21		10				1	7	2	7	3
Jabatan Fungsional Kusus BKKBN	111		72		39		38			10		28		15	23
PPPK	0						1					1			1
Non ASN	0						20	2		5		12	1	13	7
Jumlah	192	0	85	15	92	0	86	5	0	18	3	54	6	47	40

**Sumber :** Data Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

## **E. SARANA PRASARANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember menempati gedung di Jl. Jawa 51 Sumpersari – Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember cukup memadai, karena ruangan sudah terbagi setiap bidang. Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember**  
**Per 31 Desember 2024**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Portable Gerating Set	27	Baik	27
2	Pompa Air	1	Baik	1
3	Station Wagon	1	Baik	1
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah)	1	Baik	1
5	Sepeda Motor	130	Baik	130
6	Mobil Unit Penerangan Darat	6	Baik	6
7	Mesin Bor Tangan	1	Baik	1
8	Termometer Standar	1	Baik	1
9	Mesin Penghitung Uang-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1	Baik	1
10	Dst. Alat Reproduksi (Penggandaan)	1	Baik	1
11	Lemari Besi/Metal	43	Baik	43
12	Lemari Kayu 3		Baik	

13	Rak Besi	1	Baik	1
14	Rak Kayu	48	Baik	48
15	Filling Cabinet Besi	40	Baik	40
16	Filling Cabinet Kayu	1	Baik	1
17	Brandkas	2	Baik	2
18	Rotary Filling	1	Baik	1
19	Lemari Kaca	11	Baik	11
20	White Board	26	Baik	26
21	Mesin Absensi	32	Baik	32
22	Overhead Projector	22	Baik	22
23	LCD Projector/Infocus	20	Baik	20
24	Papan Pengumuman	2	Baik	2
25	Dst. ALAT KANTOR LAINNYA	4	Baik	4
26	Meja Kerja Kayu	36	Baik	36
27	Kursi Besi/Metal	68	Baik	68
28	Meja Rapat	19	Baik	19
29	Tempat Tidur Besi	5	Baik	5
30	Kursi Fiber Glas/Plastik	7	Baik	7
31	Kursi Rapat	104	Baik	104
32	Kursi Tamu	1	Baik	1
33	Kursi Putar	34	Baik	34
34	Kursi Lipat	4	Baik	4
35	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2	Baik	2
36	Lemari Es	1	Baik	1
37	A.C Sentral	2	Baik	2
38	A.C Window	3	Baik	3
39	A.C Split	14	Baik	14
40	Kipas Angin	30	Baik	30
41	Exhaust Fan	12	Baik	12
42	Televisi	3	Baik	3
43	Sound System	2	Baik	2
44	Unit Power Supply	36	Baik	36
45	Camera Vidio	5	Baik	5
46	Tustel	1	Baik	1
47	Mesin Jahit	6	Baik	6
48	Tangga Alumunium	1	Baik	1
49	Handy Cam	2	Baik	2
50	Dst. ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	109	Baik	109
51	Alat Pemadam/Portable	2	Baik	2
52	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik	1
53	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik	5
54	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	14	Baik	14
55	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	23	Baik	23
56	Meja Rapat Pejabat Eselon III	4	Baik	4

57	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	Baik	1
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik	1
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	1
60	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	58	Baik	58
61	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	1	Baik	1
62	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Baik	1
63	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	Baik	1
64	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	Baik	1
65	Lemari Buku untuk Perputakaan	3	Baik	3
66	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	2	Baik	2
67	Audio Amplifier	1	Baik	1
68	Profesional Sound System	38	Baik	38
69	Uninerruptible Power Supply (UPS)	1	Baik	1
70	Telephone Mobile	61	Baik	61
71	Facsimile	4	Baik	4
72	Publik Address (Lapangan)	19	Baik	19
73	Model Implan	3	Baik	3
74	Dst. ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	105	Baik	105
75	Dst. ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	6	Baik	6
76	Uninerruptible Power Supply (UPS)	2	Baik	2
77	Mini Komputer	2	Baik	2
78	Internet	1	Baik	1
79	Dst. KOMPUTER JARINGAN	1	Baik	1
80	P.C Unit	69	Baik	69
81	Lap. Top	34	Baik	34
82	Note Book	53	Baik	53
83	Dst. PERALATAN MAINFRAME	2	Baik	2
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	73	Baik	73
85	Bangunan Gedung Permanen	13	Baik	13
86	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1	Baik	1
87	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	19	Baik	19
88	Pagar Permanen	1	Baik	1
89	Sejarah	5	Baik	5
90	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	39	Baik	39
91	Dst. ASET LAIN-LAINNYA	43	Baik	43
92	ASET LAINNYA	82	Baik	82

## F. ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember memiliki 7 Program, 21 Kegiatan, dan 41 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 31,873,363,102,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024**

No.	Uraian	ANGGARAN
1	2	3
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	6,305,765,481
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	5,525,990,731
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,672,236,538
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	853,754,193
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	311,750,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	311,750,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	230,247,170
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49,602,700
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,651,500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139,992,970
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	94,657,573
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	66,760,173
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27,897,400
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	143,120,007
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	55,136,220

	Jabatan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87,983,787
	<b>PROGRAM PENGARASUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	124,278,190
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	47,655,190
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	47,655,190
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	22,757,500
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	22,757,500
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	53,865,500
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	53,865,500
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	148,201,481
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	30,004,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30,004,000
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	104,879,181
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	22,450,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	82,429,181
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	13,318,300
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	13,318,300
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	308,003,515
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	99,975,000
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA	99,975,000
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan</b>	77,880,015

	<b>Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	77,880,015
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	130,148,500
	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	31,467,000
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	98,681,500
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	668,928,000
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	201,190,000
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	201,190,000
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota</b>	467,738,000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	23,538,000
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	264,200,000
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	180,000,000
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	10,651,224,274
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	2,463,264,329
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	99,943,500
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	452,219,500
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1,635,336,329
	Pengendalian Program KKBPK	275,765,000
	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	744,000,000
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	744,000,000
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	6,552,680,945
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	18,315,000

	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4,126,425,771
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2,361,633,174
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46,307,000
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	891,279,000
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3,841,000
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	887,438,000
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	11,525,474,791
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	11,525,474,791
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	297,920,000
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	49,875,000
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11,177,679,791
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>29,731,875,732</b>

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2024

## G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Meningkatkan Kesetaraan dan Kualitas Sumberdaya Manusia
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Profesional, Efektif, Dan Efesien

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (*Wes Wayahe Mbenahi Jember*) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember yaitu

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Visi “ WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER” ,

- Misi ke 5 “Meningkatkan Pelayanan Dasar Berupa Kesehatan Dan Pendidikan Dasar Berupa Pendidikan Dan Kesehatan Dengan Sistem Yang Terintegrasi” Dan Tujuan “ Meningkatkan Kesetaraan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia” yaitu
- Tujuan : Meningkatkan Kesetaraan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Sasaran Strategis Kabupaten :
  - Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.
  - Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Profesional, Efektif, Dan Efisien.

Indikator Tujuan : Nilai SAKIP

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Program Yang Tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
---	----------------------------------	------	------	------	------	------	------

Sumber data : Tabel TC 25 pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Dan Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat

Indikator Tujuan : Prosentase Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR		71,64	72	72,5	73	73,5
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		54,05	55,05	56	56,05	57

Sumber data : Tabel TC 25 pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2021-2026

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. - $CPR = \frac{PUS\ BerKB}{PUS}$	Bidang Dalduk dan Bidang KB KS	SIGA
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga )	iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.	Bidang Dalduk, Bidang KB KS, Bidang PA dan Bidang PP	SIPERINDU BKKBN
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator program yang Tercapai	<b>Formulasi perhitungan:</b> Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ <b>Penjelasan indikator:</b> Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA.	Sekretariat Bidang Dalduk, Bidang KB KS, Bidang PA dan Bidang PP	Data capaian program

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Nomor : 065 / 05.19 / 35.09.317 / 2024, Tahun 2024

### **C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024. Tambah indikator yang dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan target meraih kategori utama.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2024 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2024 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana

Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET TAHUN 2024</b>
1	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR	72,5
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga )	56
		Penghargaan : Kabupaten Layak Anak	Utama
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Yang Tercapai	100 %

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember didukung dengan anggaran program 7 yaitu :

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6,949,951,513	APBD
2 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 130.051.100	APBD
3 Program Perlindungan Perempuan	Rp 220.190.800	APBD, DAK
4 Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 352.549.800	APBD, DAK
5 Program Pengendalian Penduduk	Rp 727.197.500	DAK
6 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp 11.887.419.389	DAK
7 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp. 11.606.003.000	DAK
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 31,873,363,102</b>	

#### **D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024**

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana Didukung oleh :

- Program Pengendalian Penduduk dengan Anggaran Rp 727.197.500
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan Anggaran Rp. 11.887.419.389

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 12,614,616,889 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 39 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kualitas Keluarga

Didukung oleh :

- Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Dengan Anggaran Rp 11.606.003.000
- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Dengan Anggaran Rp 130.051.100
- Program Perlindungan Perempuan Dengan Anggaran Rp. 220.190.800
- Program Perlindungan Khusus Anak Dengan Anggaran Rp. 352.549.800

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 12,308,794,700 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 39 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024**

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (5/7 *100%)
1	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR	72,5	74,3	102%	73,5	101%
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga )	56	59,24	106%	57	104%
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Yang Tercapai	100 %	100 %	100%	100 %	100 %

Sumber Data Realisasi : Laporan dari aplikasi SIPERINDU.ONLINE dari BKKBN 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 3 indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember rata rata mencapai 103 % dan masuk dalam kategori sangat tinggi Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan kenaikan Dengan demikian maka secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR	69,1	71,6	71,8	74,3
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga )	55,36	54,05	59,41	59,24
Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Yang Tercapai	100%	100%	100%	100%

Sumber Data Realisasi : Laporan dari aplikasi SIPERINDU.ONLINE dari BKKBN 2024

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Keluarga

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren naik dan turun realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2024		
			Kab.Jember	Provinsi Jawa Timur	Nasional
1	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR	74.3	68.3	61.7
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga )	59.24	62.7	62.4

Sumber Data Realisasi : Laporan dari aplikasi SIPERINDU.ONLINE dari BKKBN 2024

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Jember pada angka mCPR berada diatas realisasi kinerja Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Tetapi pada pembangunan keluarga masih perlu ditingkatkan, karena masih di bawah rata realisasi kinerja Provinsi Jawa Timur dan Nasional

### C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5  
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Serapan Anggaran
		(Rp....)	(Rp....)	
Sasaran 1 :	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>727,197,500</b>	<b>668,928,000</b>	<b>92%</b>
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>214,862,500</b>	<b>201,190,000</b>	<b>94%</b>
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	214,862,500	201,190,000	94%
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota</b>	<b>512,335,000</b>	<b>467,738,000</b>	<b>91%</b>

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	59,935,000	23,538,000	39%
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	272,400,000	264,200,000	97%
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	180,000,000	180,000,000	100%
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	11,887,419,389	10,651,224,274	<b>90%</b>
<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>2,816,435,739</b>	<b>2,463,264,329</b>	<b>87%</b>
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100,000,000	99,943,500	100%
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	457,185,000	452,219,500	99%
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1,933,019,739	1,635,336,329	85%
Pengendalian Program KKBPK	326,231,000	275,765,000	85%
<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>773,949,000</b>	<b>744,000,000</b>	<b>96%</b>
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	29,949,000		0%
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	744,000,000	744,000,000	<b>100%</b>
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7,292,362,650</b>	<b>6,552,680,945</b>	<b>90%</b>
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	92,700,000	18,315,000	20%
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4,603,605,000	4,126,425,771	90%
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2,549,708,650	2,361,633,174	93%
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46,349,000	46,307,000	100%

	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>1,004,672,000</b>	<b>891,279,000</b>	<b>89%</b>
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3,841,000	3,841,000	100%
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	1,000,831,000	887,438,000	89%
	<b>TOTAL</b>	<b>12,614,616,889</b>	<b>11,320,152,274</b>	<b>90%</b>
SASARAN 2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>11,606,003,000</b>	<b>11,525,474,791</b>	<b>99%</b>
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	11,606,003,000	11,525,474,791	<b>99%</b>
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	306,000,000	297,920,000	97%
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	50,000,000	49,875,000	100%
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11,250,003,000	11,177,679,791	99%
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>220,190,800</b>	<b>148,201,481</b>	<b>67%</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>35,923,000</b>	<b>30,004,000</b>	<b>84%</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	35,923,000	30,004,000	84%
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>140,331,800</b>	<b>104,879,181</b>	<b>75%</b>
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban	22,980,800	22,450,000	98%

Kekerasan Kabupaten/Kota	Kewenangan			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		117,351,000	82,429,181	70%
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>43,936,000</b>	<b>13,318,300</b>	<b>30%</b>
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		43,936,000	13,318,300	30%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>		352,549,800	308,003,515	<b>87%</b>
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		100,075,000	99,975,000	<b>100%</b>
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA		100,075,000	99,975,000	100%
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		118,024,800	77,880,015	<b>66%</b>
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		118,024,800	77,880,015	66%
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		134,450,000	130,148,500	<b>97%</b>
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota		34,450,000	31,467,000	91%
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		100,000,000	98,681,500	99%
<b>TOTAL</b>		<b>12,178,743,600</b>	<b>11,981,679,787</b>	<b>98%</b>

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja

**sasaran I** : Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

BIDANG : KBKS				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : PENGENDALIAN PENDUDUK			
	Kegiatan : PEMADUAN DAN SINKRONISASI, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 214.862.500,-	Rp. 201.190.000,-	93,6
	Outcome : Angka pernikahan anak turun			
	Output : Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak.			
	Pelaksanaan Kegiatan :			
	Kegiatan Optimalisasi PKBR Tempat : Aula PB Sudirman Hari/Tanggal : Kamis, 19 September 2024 Jam : 08.00 WIB Peserta : 165 orang terdiri dari pengasuh pondok pesantren, Santri, Ketua TP PKK kecamatan , penanggung jawab kesling Puskesmas dan pengurus TP PKK kabupate Narasumber : Kemenag, Dokter Spesialis Kebidanan, Dinas Kesehatan  Notulensi ( laporan kegiatan ) Acara di mulai pada pukul 08.00 WIB, diawali dengan registrasi. Pukul 09.00 acara di buka oleh Ibu Dra. Hj.Kasih Fajarini Selaku ketua TP KK kabupaten Jember. Pemberian materi oleh narasumber dari kemenag tentang Pernikahan Islam, Dokter spesialis kandungan : Kesehatan Reproduksi, Dinas Kesehatan : Kesehatan Lingkungan di pondok pesantren. Acara di tutup Pukul 13.00 WIB  Kegiatan : Sosialisasi Pencegahan perkawinan Anak Tempat : Aula Dinas Pendidikan Hari/Tanggal : Kamis, 19 September 2024 Jam : 10.00 WIB			

Peserta : 124 orang terdiri dari kader kadarkum desa , ketua Pokja TP PKK kecamatan dan pengurus TP PKK kabupaten  
Narasumber : Pokja 1 PKK, Kemenag, DP3AKB

Notulensi ( laporan kegiatan )

Pukul 10.30 acara di buka oleh Ibu Dra. Hj.Kasih Fajarini Selaku ketua TP KK kabupaten Jember. Pemberian materi oleh narasumber dari Kemenag tentang Regulasi UU Perkawinan. DP3AKB tentang Kebijakan pemerintah daerah daerah tentang cegah perkawinan anak. Pokja 1 kabupaten :Peningkatan kapasitas kader kadarkum dalam pencegahan perkawinan anak Acara di tutup Pukul 14.00 WIB.

Kegiatan : Pembinaan Karakter Remaja  
Tempat : SMPN 2 Gumukmas, SMPN 1 Sumberjambe, SMPN 1 Ajung, SMPN 2 Bangsalsari, SMPN 1 Puger  
Hari/Tanggal : Senin-Sabtu, 18-23 November 2024  
Jam : 8.00 WIB  
Peserta : Masing-masing 50 orang  
Narasumber : Polres Jember, FKM UNEJ, DP3AKB, Pokja 1 PKK

Notulensi ( laporan kegiatan )

Kegiatan dilaksanakan di 5 Sekolah terpilih yaitu SMPN 2 Gumukmas, SMPN 1 Sumberjambe, SMPN 1 Ajung, SMPN 2 Bangsalsari, SMPN 1 Puger. Narasumber dari Polres memberikan materi Narkoba DP3AKB materi Pencegahan perkawinan Anak. Fakultas Kesehatan masyarakat Unej materi Gizi dan pencegahan stunting bagi remaja. Pokja 1 TP PKK materi karakter remaja. Acara ditutup jam 12.00 WIB.

Kegiatan : Bimtek Pokja 4.  
tempat : Aula PKK Kab. Jember  
Hari/Tanggal : Kamis, 05 Desember 2024  
Jam : 10.00 WIB - selesai  
Peserta : 80 orang terdiri dari Pengurus TP PKK Kabupaten, Ketua TP PKK Kecamatan dan kader Posyandu se Kabupaten Jember  
Narasumber : Pokja 4 TP PKK Provinsi, Pokja 4 PKK Kabupaten, TA BKKBN Prov. Jawa Timur

Notulensi ( laporan kegiatan )

Pukul 10.00 acara di buka oleh Ibu Dra. Hj.Kasih Fajarini Selaku ketua TP KK kabupaten Jember. Pemberian materi oleh narasumber dari Pokja 4 TP PKK Provinsi Jawa Timur tentang Peran PKK dalam pencegahan stunting. Pokja 4 kabupaten : Peran kader PKK sebagai kader TPK. TA BKKBN : Peningkatan

	kualitas pendampingan Keluarga Resiko Stunting. Acara di tutup Pukul 14.00 WIB

Foto – Foto Kegiatan :  
Optimalisasi PKBR



Pembinaan Karakter Remaja



Bimtek POKJA 4



2	Program : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA		
Kegiatan : PELAKSANAAN ADVOKASI KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL			
Sub Kegiatan : Pengendalian Program KKBPK			
Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 326.231.000,-	Rp. 275.765.000,-	84,5
Outcome : Percepatan Penurunan Stunting			
Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting			
Pelaksanaan Kegiatan :			
Tempat : Aula PB Sudirman, Aula Bawah Pemkab Jember, Aula DP3AKB, Pendopo Wahyawibawagraha, Lobby Bupati			
Hari/Tanggal : 47 Pertemuan/rapat mulai Januari s.d Desember 2024			
Jam : 08.00 s.d selesai			
Peserta : Seluruh Tim Percepatan Stunting sesuai SK TPPS Kabupaten Jember Tahun 2024			
Narasumber : Tim Pakar terdiri dari : organisasi Profesi dan akademisi			
Notulensi ( laporan kegiatan ) Kegiatan Rapat terdiri dari :			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimtek aksi Konvergensi</li> <li>2. Replikasi Aplikasi Sayang Warga</li> <li>3. Bimtek verval data KRS</li> <li>4. Pra Sembuk Stunting</li> <li>5. Rembuk Stunting</li> <li>6. Audit Kasus Stunting (AKS) I</li> <li>7. Rakor TPPS Pembuatan Laporan TPPS Semester 1</li> </ol>			

8. Rakor Pencegahan Perkawinan Anak
9. Desk Data Hasil Pendampingan KRS
10. Bimtek Persiapan Monev TPPS Kecamatan dan Desa
11. Rakor RTL Monev TPPS Kecamatan dan Desa
12. Bimtek Monev TPPS
13. Rakor Evaluasi Monev TPPS
14. Rakor Pra AKS 2
15. AKS 2
16. Rakor Hasil Monev TPPS
17. TPPS Award
18. Rakor RTL Hasil Monev
19. Rivew Kinerja TPPS
20. Bimtek TPPS Desa Lokus

Foto – Foto Kegiatan :





3	Program : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA		
	Kegiatan : PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Sub Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 92.700.000,-	Rp. 18.315.500,-
	Outcome :		
			19,7

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatkan jumlah penduduk yang menggunakan alat kontrasepsi</li> <li>● Menurunkan AKI dan AKB</li> </ul> <p>Menurunkan angka Stunting</p>
	<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Terkendalinya distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang KB di Fasyankes</li> <li>● Meningkatkan pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di masyarakat</li> </ul> <p>Meningkatkan jumlah penduduk peserta KB</p>
	<p>Pelaksanaan Kegiatan :</p> <p>Tempat : Perwakilan BKKBN Prov.Jatim</p> <p>Hari/Tanggal : Rabu/ 04 Desember 2024</p> <p>Jam : 08.00 - Selesai</p> <p>Peserta : 4 Orang</p> <p>Narasumber : DPPPABK Kab. Jember</p> <p>Notulensi :</p> <p>Pengambilan Alat dan Obat Kontrasepsi ke Gudang Alokon Perwakilan BKKBN Prov.Jatim JL.Airlangga No.31-32 Kec.Gubeng Surabaya,Jawa Timur sebanyak 5 kali dalam tahun 2024</p> <p>Alokon dari Gudang DP3AKB Kabupaten Jember terdistribusi ke seluruh fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemberi Pelayanan KB yang terdaftar di Register BKKBN sesuai kebutuhan masyarakat.</p>

Foto – Foto Kegiatan :



4	Program : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA		
	Kegiatan : PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 4.603.605.000,-	Rp. 4.126.425.771,-
			89,6

Outcome :

- Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- Menurunkan AKI dan AKB
- Menurunkan angka Stunting

Output :

- Meningkatkan jumlah peserta KB MKJP

Pelaksanaan Kegiatan :

Tempat : Seluruh Fasyankes Pelayanan KB di Kabupaten Jember

Hari/Tanggal : Setiap hari pelayanan, Pelayanan rutin dan pelayanan momentum

Jam : sesuai jam pelayanan Fasyankes

Peserta : calon akseptor KB MKJP

Narasumber : Provider/Pemberi pelayanan KB MKJP

Notulensi ( laporan kegiatan )

Capaian MKJP Kabupaten Jember pada Tahun 2024 adalah sebesar 11.760 akseptor baru dari target tahunan sebesar 8.122 atau telah melampaui target yang ditentukan (mencapai 145%). jumlah per metode kontrasepsi yaitu : IUD 2.022 akseptor baru, MOW (Metode Operatif Wanita) 731 akseptor baru, MOP (Metode Operatif Pria) sebanyak 16 Akseptor Baru dan Implant sebesar 8.991 Akseptor Baru.

Foto – Foto Kegiatan :






5	<p>Program : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA</p> <p>Kegiatan : PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Sub Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</p>		
Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 46.349.000,-	Rp. 46.307.000,-	99,9
<p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatkan jumlah penduduk yang menggunakan alat kontrasepsi</li> <li>● Menurunkan AKI dan AKB</li> </ul> <p>Menurunkan angka Stunting</p>			
<p>Output :</p> <p>Meningkatkan kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</p>			
<p>Pelaksanaan Kegiatan : 3 kali kegiatan dalam tahun 2024</p> <p>Tempat : Aula Dinas Pendidikan, Aula DP3AKB</p> <p>Hari/Tanggal :</p> <p>Pertemuan pertama : Kamis, Tanggal 15 Februari 2024 bertempat di Aula Dinas</p> <p>Pertemuan kedua : Rabu, Tanggal 26 Juni 2024 di Aula DP3AKB</p> <p>Pertemuan ketiga : Kamis, Tanggal 29 November 2024 di Aula DP3AKB</p> <p>Jam : 08.00 s.d 14.00</p> <p>Peserta : Seluruh fasyankes pemberi pelayanan KB di Kabupaten Jember</p> <p>Narasumber : Kepala DP3AKB</p>			

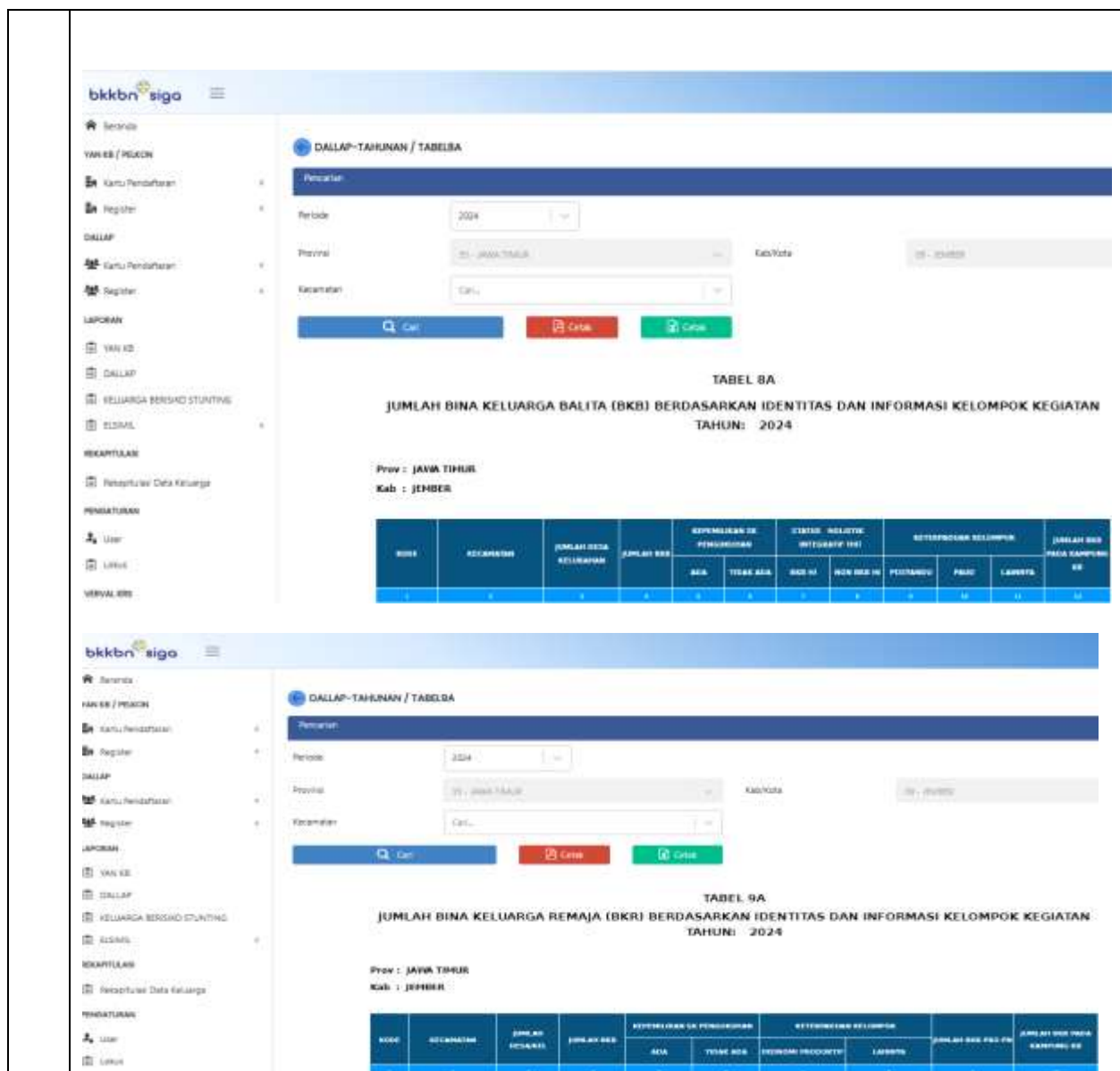
Notulensi ( laporan kegiatan )

1. Sambutan Kepala DP3AKB
2. Penyampaian Materi Rencana Pelayanan dan Evaluasi hasil Pelayanan KB
3. Diskusi dan tanya jawab

Foto – Foto Kegiatan :



<b>BIDANG : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI</b>				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Program Pengendalian Penduduk			
	Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 272.400.000	Rp.264.200.000	96%
	Outcome :			99,14%
	Pencatatan dan Pelaporan di Fasyankes yang <i>update</i>	1164 Kegiatan (97 Faskes x 12 bln)	1154 Kegiatan	
	Output :			
	1. Fasyankes yang teregister	Fasyankes : 97	Fasyankes : 97	100%
	2. Terkumpulnya data Poktan	BKB : 275 BKR : 197 BKL : 245 UPPKA : 82 PIK-R : 198 RDK : 248	BKB : 275 BKR : 197 BKL : 245 UPPKA : 82 PIK-R : 198 RDK : 248	
	Pelaksanaan Kegiatan :			
Tempat : 98 Faskes dan 248 Desa/Kelurahan				
Hari/Tanggal : Januari s/d Desember 2024				
Jam : 08.00 s/d selesai				
Peserta : Petugas Reporting and Recording Fasyankes, PPKB dan Sub PPKB				
Narasumber : -				
Notulensi ( laporan kegiatan )				
1. Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pelayanan KB di Fasyankes setiap bulan				
- Melakukan pencatatan terkait Mutasi alat kontrasepsi pada aplikasi SIGA				
- Melakukan pelaporan terkait sasaran yang menggunakan alat kontrasepsi semua metode pada aplikasi SIGA				
2. Pemutakhiran Data Potensi Wilayah 2 kali per tahun				
- Melakukan updating terkait K/0				
- Melakukan Verifikasi dan Validasi sasaran yang terdapat didalam aplikasi SIGA				
Foto – Foto Kegiatan :				
 <p>The screenshot shows the 'bkkbn siga' web interface. It includes a sidebar with navigation options like 'Beranda', 'YAKI / FILEDIN', 'Kartu Pendaftaran', 'DAFTAR', 'LAPORAN', 'REKAPITULASI', and 'PENCATATAN'. The main content area displays a data entry form for 'YaniB-Tahunan / Tabel1' with fields for 'Periode', 'Provinsi', 'Kab/Kota', and 'Kecamatan'. Below the form is a table titled 'TABEL 1: JUMLAH TEMPAT PELAYANAN KB BERDASARKAN JENIS TAHUN: 2024' for 'Prov: JAWA TIMUR' and 'Kab: BOMBAY'. The table has columns for 'JENIS PELAYANAN' (K/0, K/1, K/2, K/3, K/4, K/5, K/6, K/7, K/8, K/9, K/10, K/11, K/12, K/13, K/14, K/15, K/16, K/17, K/18, K/19, K/20) and 'JUMLAH'.</p>				



<b>BIDANG : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI</b>				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
2	Program : Program Pengendalian Penduduk			
	Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten			
	Sub Kegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000	100,00
	Outcome : data dasar Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Balai Penyuluhan KB masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Keluarga	Data BNBA KRS : - Calon Pengantin - Ibu Hamil - Ibu Nifas - Baduta - Balita	657 Catin 22016 Bumil 5566 Bufas 52149 Baduta 88523 Balita	100,00

Output : data register pengendalian lapangan 31 Kecamatan x 12 kegiatan (bulan) 31 Kecamatan x 12 kegiatan (bulan) 100,00

**Pelaksanaan Kegiatan :**

Tempat : 31 Kecamatan  
 Hari/Tanggal : Januari s/d Desember 2024  
 Jam : 08.00 Wib s/d selesai  
 Peserta : 31 Petugas Pengolah Data  
 Narasumber : -

**Notulensi ( laporan kegiatan )**

1. Download sasaran KRS per desa dari Aplikasi SIGA
2. Menggabung sheet (15 KK per sheet 1 sheet per desa)
3. Melengkapi identitas (NIK) sasaran yang didampingi oleh TPK (Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Nifas/Pasca Persalinan, Baduta 0-23 bulan dan Balita 24-59 bulan)
4. Melengkapi Identitas TPK (No Tim dan nama anggota TPK) yang mendampingi KRS
5. Melengkapi Nama Posyandu
6. Melengkapi kepesertaan Keluarga Berencana (Bukan peserta KB modern,
7. Melengkapi Informasi pendampingan yang diterima Suntik, pil, kondom, implant, IUD, MOP, MOW
8. Melengkapi informasi PUS bukan peserta KB ( Ingin Hamil Segera, Ingin Hamil Nanti, Tidak Ingin Anak Lagi)
9. Melengkapi Pendampingan yg Diterima (Rujukan, Bansos, KIE, Elsimil, EPPGBM, BAAS, PMT, DASHAT)
10. Mengisi hasil pendampingan KRS Januari sampai Desember 2024

**Foto – Foto Kegiatan :**





<p>sasaran <i>Stunting</i>; 3. Tersedia dan terlaksananya Prosedural Operasional percepatan penurunan <i>stunting</i></p>	<p>yang memiliki Antropometri Kit dan Aplikasi EPPBGM 3. Ada SPO percepatan penurunan <i>stunting</i></p>	<p>memiliki Antropometri Kit 3. Ada Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i></p>
<p>Output : tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga serta laporan kondisi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan program percepatan penurunan <i>stunting</i> di seluruh desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan</p>	<p>31 Kec x 10 Bulan</p>	<p>31 Kec x 10 Bulan      100,00</p>
<p>Pelaksanaan Kegiatan : Tempat : Hari/Tanggal : Jam : Peserta : Narasumber :</p>	<p>: 31 Balai Penyuluhan KB : Februari sd November 2024 (10 bulan) : 08.00 sd selesai : 8-10 TPPS Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan : 1. Ketua TPPS Kecamatan 2. Kepala Puskesmas 3. Penyuluh KB 4. Monitoring pelaksanaan oleh TPPS Kabupaten dan Komisi D DPRD Kabupaten Jember</p>	
<p>Notulensi (laporan kegiatan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan oleh Ketua TPPS Kecamatan</li> <li>2. Evaluasi pelayanan kesehatan, perkembangan kasus <i>stunting</i>, analisa faktor risiko dan rencana tindak lanjut strategi penanganan kasus dipaparkan oleh Kepala Puskesmas</li> <li>3. Evaluasi capaian Program Bangga Kencana, rencana tindak lanjut bulan sebelumnya, hasil pendampingan Keluarga Beresiko <i>Stunting</i> oleh Tim Pendamping Keluarga, Intervensi yang telah dilaksanakan, analisa dan solusi, Rencana Tindak Lanjut strategi penanganan masalah serta Kesimpulan dipaparkan oleh Penyuluh KB</li> <li>4. Diskusi untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun skala prioritas kasus <i>stunting</i> yang harus ditangani dengan segera berdasarkan data kondisi <i>stunting by name by adres</i></li> <li>- Verifikasi, validasi dan sharing data terkini tentang kondisi balita <i>stunting/ berisiko</i> di lapangan, agar semua terdampingi</li> <li>- Menginventarisir kegiatan konvergensi lintas sektor yang bisa dikolaborasikan implementasinya dalam upaya Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</li> <li>- Pencatatan pelaporan tepat waktu setiap bulannya (manual dan elsimil)</li> </ul> </li> </ol>		
<p>Foto – Foto Kegiatan :</p>		



<b>BIDANG : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI</b>				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
4	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			
	Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
	Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp 100.000.000,00	Rp 99.943.000,00	99,94
Outcome : Peningkatan Pengetahuan	Pembentukan 26 Sekolah Siaga	Terbentuk 26 SSK	100,00	

Bagi Guru dan siswa/santri sebagai penggerak di sekolah/Pondok Pesantren yang peduli kependudukan	Kependudukan (SSK)		
Output : Tersampainya materi KIE Program Bangga Kencana dan Pencegahan <i>Stunting</i>	1. Workshop dan Studi Tiru Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) 1 kali 2. KIE di Pondok Pesantren 1 kali	1. Workshop dan Studi Tiru Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) 1 kali 2. KIE di Pondok Pesantren 1 kali	100,00
Pelaksanaan Kegiatan	: 1. Workshop Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Studi Tiru		
Tempat	: Malang (SMAN 1 Turen dan MTsN 3 Malang)		
Hari/Tanggal	: 18 sd 19 September 2024		
Jam	: 08.00 sd selesai		
Peserta	: 31 (Kepala Sekolah/Guru, IPeKB, FKM Unej/ IAKMI, FAJ, dan OPD KB)		
Narasumber	: Perwakilan BKKBN Prov Jatim dan UNESA Surabaya		
Notulensi ( laporan kegiatan )	1. Hari pertama Workshop SSK 2. Hari kedua Studi Tiru ke SMAN Turen dan MtsN 3 Malang		
Pelaksanaan Kegiatan	: 2.KIE Cegah Resiko Stunting Dengan Pendewasaan Usia Pernikahan “STOP PERKAWINAN ANAK” Melalui Pondok Pesantren		
Tempat	: PP Bustanul Ulum Desa Mlokorejo Kecamatan Puger		
Hari/Tanggal	: Selasa/ 22 Oktober 2024		
Jam	: 08.00 sd selesai		
Peserta	: Muspika, Ka. Puskesmas, Kepala Desa Perangkat Desa, Santri, Ustdz/Ustdzah, Tokoh Agama, Penyuluh KB, Tokoh Masyarakat dan Kader KB.		
Narasumber	: Kemenag Jember, Kanit PPA POLRES Jember dan HIMPSI		
Notulensi (laporan kegiatan )	1. Tinjauan pernikahan usia dari perspektif agama 2. Sosialisasi UU TPKS, tentang perlindungan kekerasan bagi usia anak 3. Tinjauan perkembangan psikologis bagi anak yang melangsungkan perkawinan		
Foto – Foto Kegiatan :			

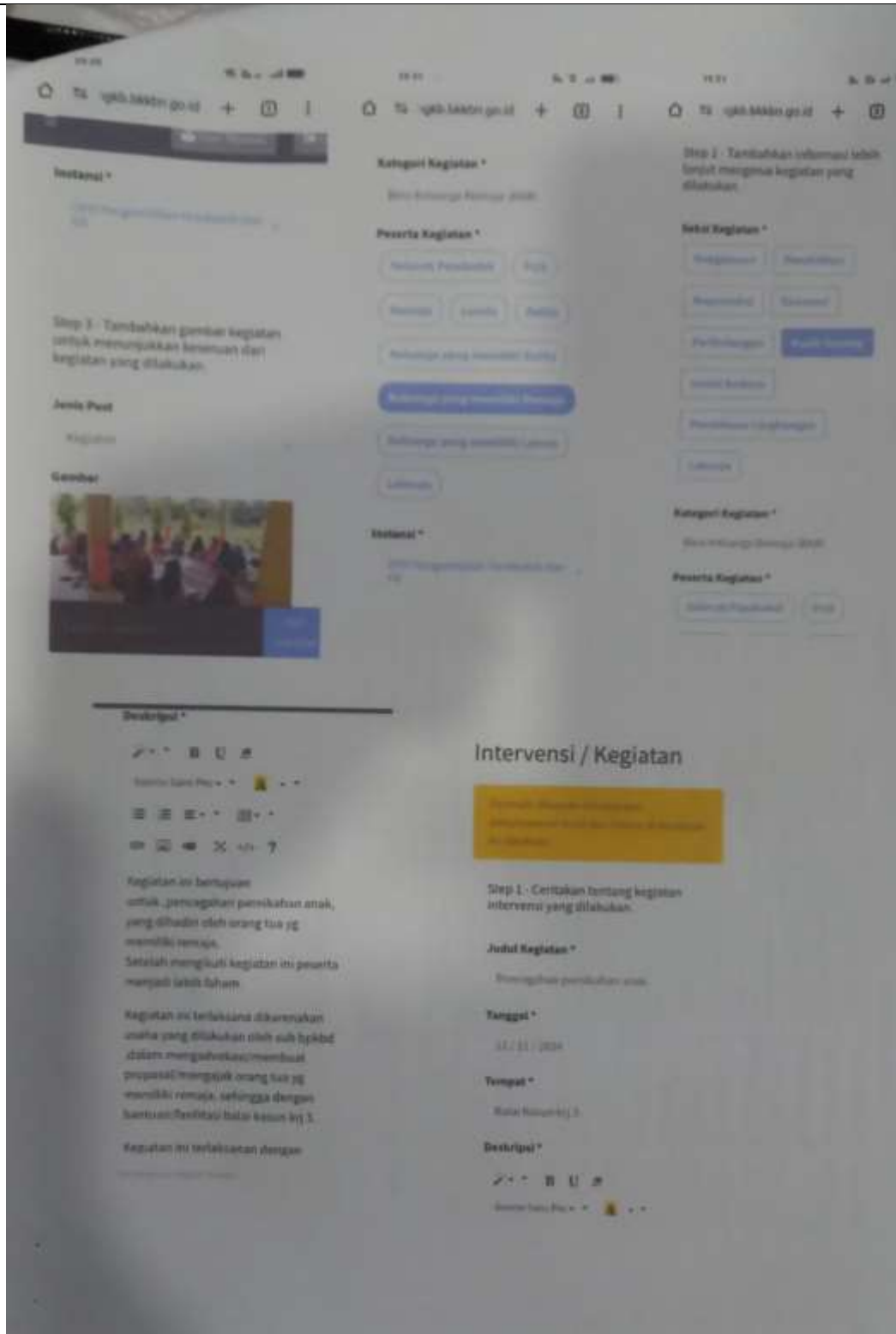






<b>BIDANG : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI</b>				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
5	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			
	Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
	Sub Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 744.000.000,00	Rp744.000.000,00	100,00
	Outcome :			100,00
1) Meningkatnya kesertaan ber-KB;	Peserta KB aktif meningkat	Peserta KB aktif : 300.781		
2) Meningkatnya partisipasi Keluarga dalam Poktan BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA; dan	Partisipasi keluarga dalam Poktan meningkat	IUD : 24.047 Implant : 8767 MOP : 240 MOW : 5082		
3) Meningkatnya partisipasi anggota Keluarga untuk memeriksakan kesehatan-nya di Posyandu dan/atau Fasyankes.		Partisipasi keluarga dalam Poktan: BKB : 14.175 BKR : 9.493 BKL : 8.230 UPPKA : 1473		
Output : Terlaksananya promosi, sosialisasi Program Bangga Kencana yang disampaikan	744 kegiatan x 10 bulan	744 kegiatan x 10 bulan	100,00	

	<p>oleh kader PPKBD atau Sub-PPKBD dan/atau Tenaga Lini Lapangan melalui pelayanan KIE kepada sasaran langsung yaitu Keluarga dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan</p>
	<p>Pelaksanaan Kegiatan :  Tempat : 248 Desa/Kelurahan  Hari/Tanggal : Februari sd November 2024  Jam : 08.00 sd selesai  Peserta : Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R)  Narasumber : Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)</p> <p>Notulensi (laporan kegiatan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengasuhan 1000 HPK</li> <li>2. Konsep Lansia Tangguh</li> <li>3. Komunikasi Efektif Orang Tua dan Remaja</li> <li>4. Remaja Berencana</li> <li>5. Kesehatan Reproduksi</li> <li>6. Menjadi Orang Tua Hebat</li> </ol>
	<p>Foto – Foto Kegiatan :</p>




<b>BIDANG : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI</b>				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
6	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			
	Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
	Sub Kegiatan : Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 29.949.000,00	Rp 0,00	0,00
	Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Keluarga risiko <i>stunting</i> dalam penyediaan makanan bergizi dan/atau Fasyankes.			
	Output : pemberian edukasi gizi, pendampingan, dan pembiasaan konsumsi makanan bergizi melalui Dapur Sehat Atasi <i>Stunting</i>			
	Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak sesuai petunjuk teknis BOKB			
	Foto – Foto Kegiatan :			

<b>BIDANG : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI</b>				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
7	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			
	Kegiatan : Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
	Sub Kegiatan : Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 3.841.000,00	Rp. 3.841.000,00	100,00
	Outcome : Terselenggaranya konvergensi program di Kampung KB Penyelenggaraan Kampung KB terintegrasi lintas sektor Penyelenggaraan Kampung KB terintegrasi lintas sektor			
	Output : Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan Kampung KB Dilaksanakan 1 kali Dilaksanakan 1 kali			
	Pelaksanaan Kegiatan : Tempat : Aula Bina Kencana DP3AKB Hari/Tanggal : Senin, 1 April 2024 Jam : 08.00 - selesai Peserta : Unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas Sosial, TP PKK, Kepala Bidang di DP3AKB, IPeKB, Narasumber : Kabid Dalduk Adpin DP3AKB, IPeKB Notulensi ( laporan kegiatan ) 1. Arahan Kepala			
	Foto – Foto Kegiatan :			



<b>BIDANG : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI</b>				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
8	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			
	Kegiatan : Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
	Sub Kegiatan : Pembinaan Terpadu Kampung KB			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 1.000.831.000,00	Rp. 887.438.000,00	88,67
Outcome :				
1. Tersusunnya RKM	1. RKM 248 Kampung KB	1. RKM 248 Kampung KB		
2. Terlaporkannya kegiatan di Website Kampung KB	2. Laporan Website 248 Kampung KB	2. Laporan Website 248 Kampung KB		
3. Meningkatnya partisipasi Keluarga dalam kegiatan Poktan				
Output :				
1. Terlaksananya Pertemuan Pokja Kampung KB	1. Pertemuan Pokja 3 kali per Kampung KB	1. Pertemuan Pokja 3 kali per Kampung KB	100,00	
2. Terlaksananya	2. Pembinaan	2. Pembinaan	77,44	

Kegiatan Poktan di Kampung KB	Poktan 4610 kali	Poktan 3570 kali	
<p>Pelaksanaan Kegiatan :</p> <p>Tempat : Aula Bina Kencana dan Kampung KB di 31 Kecamatan</p> <p>Hari/Tanggal : April – Oktober 2024</p> <p>Jam : 08.00 - selesai</p> <p>Peserta : Ketua / Pengurus Pokja Kampung KB</p> <p>Narasumber : OPD KB, Penyuluh KB</p> <p>Notulensi ( laporan kegiatan )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan dan analisis data</li> <li>2. Penyusunan rencana kerja</li> <li>3. Pencatatan dan Pelaporan kegiatan</li> <li>4. Monitoring rencana kerja dan capaian program</li> </ol>			
<p>Foto – Foto Kegiatan :</p> 			



<b>BIDANG : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI</b>				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 1	Capaian 1	% 100,00
9	Program : Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)			
	Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga			
	Sub Kegiatan : Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R Dan Pemberayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 50.000.000,00	Rp. 49.875.000,00	99.75
	Pelaksanaan Kegiatan : Pelatihan Kader Desa Bangga			
	Tempat : Pendopo Kecamatan Kaliwates Dan Aula Bina Kencana DP3AKB Kabupaten Jember			
	Hari/Tanggal : Kamis/28 November 2024			
	Jam : 08.00 sd selesai			
	Peserta : Operator RDK 31 Kecamatan, Mahasiswa Peduli Stunting FKM Unej, Kader RDK Kelurahan Kebonagung			
	Narasumber : Dosen FKM Unej, Perwakilan BKKBN Jawa Timur			
	Notulensi ( laporan kegiatan )			
	1. Sosialisasi dan Launching RDK Digital oleh Ketua TPPS Kab. Jember			
	2. Pelatihan Operator RDK			
	Foto – Foto Kegiatan :			



Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran II** : Meningkatkan Kualitas Keluarga adalah sebagai berikut :

1	Program : PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
	Kegiatan : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan UPPKA)			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 11.250.003.000,-	Rp. 11.177.679.791,-	99,3
	Outcome : Data Keluarga Resiko Stunting (KRS) lengkap dan terupdate			
	Output : Menghasilkan data keluarga beresiko stunting (KRS) yang valid dan mutakhir			
	Pelaksanaan Kegiatan : Honor Pengolah Data Tempat : Balai KB Kecamatan se-Kabupaten Jember Hari/Tanggal : Bulan Januari s/d Desember Jam : - Peserta : 34 orang Pengolah Data Narasumber : - Notulensi ( laporan kegiatan ) 1. Data keluarga beresiko stunting dilaporkan setiap bulan secara rutin, melalui SIGA			

Foto – Foto Kegiatan :



2	Program : PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
	Kegiatan : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan UPPKA)		
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 11.250.003.000,-	Rp. 11.177.679.791,-
	Outcome : Data Keluarga Resiko Stunting (KRS) lengkap dan terupdate		
	Output : Menghasilkan data keluarga beresiko stunting (KRS) yang valid dan mutakhir		
	Pelaksanaan Kegiatan : Belanja Pulsa TPK dan honor TPK		
	Tempat	: 248 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Jember	
	Hari/Tanggal	: Bulan Maret s/d Desember	
	Jam	: -	
	Peserta	: 5625 Kader TPK	
	Narasumber	: -	

Notulensi ( laporan kegiatan )

1. Pendataan baduta, ibu hamil, calon pengantin, dan ibu pasca salin terupdate
2. TPK melakukan skrining awal faktor resiko stunting
3. TPK melakukan pendampingan kepada Keluarga Resiko Stunting (KRS), dengan memberikan penyuluhan dan edukasi, melakukan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, memfasilitasi pelayanan rujukan
4. TPK melakukan pelaporan dan input data ke aplikasi SIGA dan Elsimil

Foto – Foto Kegiatan :



	BIDANG : Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan			
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARASUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
	Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 49.338.700	Rp. 47.655.190	96,59%
	Outcome : 1. Peserta memahami tentang kebijakan PUG 2. Peserta memahami alur Penyusunan PPRG Perangkat Daerah telah memahami perencanaan pembangunan responsive gender			
	Output : 1. Terselenggara kegiatan PUG 2. Terselenggaranya kegiatan penyusunan PPRG 3. Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembangunan responsive gender			
Pelaksanaan Kegiatan : Tempat : 1. Aula Bawah Pemkab Jember 2. Aula Bawah Pemkab 3. Aula Balai Desa ( Dukuhdempok, Balung dan wonoasri) Hari/Tanggal : 1. Kamis, 21 Maret 2024 2. Rabu, 12 Juni 2024 3. Rabu, 21 Februari 2024 Jam : 09.00 WIB - Selesai Peserta : 1. Camat se Kabupaten Jember 2. Kepala Desa 3. Lembaga masyarakat 4. Kemenag Jember 5. OPD se kabupaten Jember Narasumber : 1. Kementerian PPA 2. PUPAGA 3. Kepolisian Resor Jember (Polres Jember) 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember				

- 5. Psikolog Garwita Instute Jember
- 6. Fasilitator Daerah PUG dan DRPPA

Notulensi ( laporan kegiatan )

1. Untuk memperkuat komitmen OPD Driver Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender,
2. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG),
3. agar Perangkat Daerah membentuk Kelembagaan PUG melalui Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah, dan terakhir agar Perangkat Daerah mampu menyusun RKA yang berlandaskan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah
- 4.

Foto – Foto Kegiatan :



BIDANG : Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : 2.08.02	PROGRAM PENGARASUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	Kegiatan : 2.08.02.2.02	Pemberdayaan perempuan bidang politik, Hukum, social dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, social dan ekonomi		
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 25.326.400	Rp. 22.757.500	89,86%
Outcome :				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pemahaman tentang Desa Ramah Perempuan dan peduli anak</li> <li>2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam keterlibatan musrenbang baik kabupaten ataupun desa</li> </ol> <p>Meningkatnya pemahaman tentang peraturan perlindungan perempuan</p>
	<p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya Kegiatan sosialisasi tentang Desa Ramah Perempuan dan peduli anak</li> <li>2. Terselenggaranya sosialisasi tentang partisipasi perempuan dalam keterlibatan musrenbang baik kabupaten ataupun desa</li> <li>3. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang peraturan perlindungan perempuan</li> </ol>
	<p>Pelaksanaan Kegiatan :</p> <p>Tempat : 1. Aula PB Sudirman 2. Aula Bawah Pemkab 3. Aula Bangga Kencana</p> <p>Hari/Tanggal : 1. Senin, 12 Februari 2024 2. Jumat, 16 Februari 2024 3. Selasa, 21 Februari 2024</p> <p>Jam : 09.00 WIB - Selesai</p> <p>Peserta : 1. Camat se Kabupaten Jember 2. Kepala Desa 3. Lembaga masyarakat 4. Kemenag Jember 5. OPD se kabupaten Jember 6. KEJAKSAAN 7. Unit PPA</p> <p>Narasumber : 1. Kementerian PPA 2. PUPAGA 3. Kepolisian Resor Jember (Polres Jember) 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember 5. Fasilitator Daerah PUG dan DRPPA</p> <p>Notulensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pemahaman tentang Desa Ramah Perempuan dan peduli anak</li> <li>2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam keterlibatan musrenbang baik kabupaten ataupun desa</li> <li>3. Meningkatnya pemahaman tentang peraturan perlindungan perempuan</li> </ol>
	<p>Foto – Foto Kegiatan :</p>



	BIDANG : Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan			
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
	Kegiatan : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 22.980.800	Rp. 22.450.000	97,69%
	Outcome :			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemahaman Indikator Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak</li> <li>• Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender</li> <li>• Peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/Pendidikan anak</li> <li>• Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul> Pencegahan perkawinan anak			
	Output :			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami Indikator tentang Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami tentang pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender</li> <li>• Memahami peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/ Pendidikan anak</li> <li>• Memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul> <p>Memahami Pencegahan perkawinan anak</p>
	<p>Pelaksanaan Kegiatan :</p> <p>Tempat : 1. Aula Desa Kencong 2. Aula Kampus 1 dan 2 UIJ 3. Aula PLUT K-UMKM Kabupaten Jember</p> <p>Hari/Tanggal : 1. 22 Juni 2024 2. 25 Juni 2024 3. 30 Oktober 2024</p> <p>Jam : 09.00 WIB - Selesai</p> <p>Peserta : 1. Griya Asih 2. Kepala Desa 3. Lembaga masyarakat 4. Purna PMI 5. Mahasiswa</p> <p>Narasumber : 1. Lembaga Masyarakat 2. PUPAGA 3. Kepolisian Resor Jember (Polres Jember) 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember 5. Psikolog Garwita Institute Jember 6. Fasilitator Daerah PUG dan DRPPA</p> <p>Notulensi ( laporan kegiatan )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemahaman tentang Indikator Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak</li> <li>2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender</li> <li>3. Peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/Pendidikan anak</li> <li>4. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>5. Pencegahan perkawinan anak</li> </ol>
	<p>Foto – Foto Kegiatan :</p>



	BIDANG : Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan			
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
	Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 35.923.000	Rp. 30.004.000	83,52%
	Outcome :			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman tentang bahaya perkawinan anak</li> <li>• Meningkatkan pemahaman kesesuaian kegiatan dengan perencanaan yang selama ini dilakukan</li> <li>• Meningkatkan kemampuan mengidentifikasi masalah perempuan dan anak yang timbul selama ini agar dapat segera diatasi dan mendapatkan solusi</li> <li>• Meningkatkan kemampuan menilai apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk menekan angka perkawinan anak</li> <li>• Meminimalisir hambatan dan memperoleh solusi pemecahan masalah yang tepat dan akurat untuk menekan angka perkawinan anak</li> </ul> <p>Menekan angka perkawinan anak dikabupaten Jember</p>
	<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami pemahaman tentang bahaya perkawinan anak</li> <li>• Memahami kesesuaian kegiatan dengan perencanaan yang selama ini dilakukan</li> <li>• Mampu mengidentifikasi masalah perempuan dan anak yang timbul selama ini agar dapat segera diatasi dan mendapatkan solusi</li> <li>• Mampu menilai apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk menekan angka perkawinan anak</li> <li>• Mampu meminimalisir hambatan dan memperoleh solusi pemecahan masalah yang tepat dan akurat untuk menekan angka perkawinan anak</li> </ul> <p>Mampu menekan angka perkawinan anak dikabupaten Jember</p>
	<p>Pelaksanaan Kegiatan :</p> <p>Tempat : 1. Aula Bawah Pemkab 2. Aula Hotel Luminor 3. Aula BKKBN</p> <p>Hari/Tanggal : 1. 23 Oktober 2024 2. 13-14 September 2024 3. 11 Desember 2024</p> <p>Jam : 09.00 WIB - Selesai</p> <p>Peserta : 1. Penyuluh KB 2. Dinas Kesehatan 3. Pengadilan Agama 4. Lembaga Masyarakat 5. PUPAGA 6. KEMENAG 7. HIMPSI</p> <p>Narasumber : 1. Lembaga Masyarakat</p>

2. PUPAGA

3. Pengadilan Agama

4. HIMPSI

Notulensi ( laporan kegiatan )

1. KEMENAG menyampaikan : selamat atas capaian DP3AKB dalam rangka menurunkan angka perkawinan anak melalui SE bupati bisa meminimalisir angka perkawinan hal ini dengan adanya laporan KUA dimasing-masing kecamatan, KUA menyampaikan perubahan paling signifikan dengan se bupati dengan program dp3akb perubahan angka karena dengan mengeluarkan surat penolakan cukup sedikit , selain itu juga kemenag juga menyampaikan perbandingan 4 bulan yang sama di tahun sebelumnya ini sangat menurun , angka permohonan diska ditahun dulu cukup tinggi ini dikarenakan hanya kemenag dengan pengadilan agama namun pada tahun 2024 dengan adanya kolaborasi lintas sektor menekan angka perkawinan anak dan namun pada tahun ini dikhawatirkan banyak yang menikah sirri. Kegiatan kolaborasi yang dilakukan kua dengan kecamatan plkb dan babinsa, babinmas untuk pencegahan perkawinan anak di grass root. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan Tetap mendukung kegiatan dp3akb untuk melakukan pencegahan perkawinan anak.
2. Pertanyaan dari pak joko pada tahun 2023 daerah yang menjadi gudnag diska ledokombo kenapa bergeser daerah puger selatan?
3. Pak kusno Kua patrang : KUA Patrang juga telah melakukan kegiatan FGD dengan babinsa dan babinmas dan sampai mengalami penurunan perkawinan anak , fgd di jumerto menyarnalan kepada pemangku kepentingan rt rw pemuka agama dilibatkan dan akhirnya. Dan juga menyarankan 3 pilar harus dijalankan dan betul dilaksanakan dan perlu penegak hokum untuk mensosialisasikan tentang ancaman hukuman untuk perkawinan anak. Dampak dari angka menurunnya angka perkawinan anak namun angka itsbat meningkat. Ada program bin win dan sudah ada modul dan pelatih yang sudah terlatih jika ada catin untuk memahami maksud dan tujuan perkawinan yang tidak mengikuti binwin maka tidak akan didatangi perkawinan.
4. Dinkes: angka kematian ibu masih no 1 di jawa timur, dinkes juga membacakan alur permohonan diska di dinas kesehatan; pertanyaan dari kabid pa, harus ada pemeriksaan ke labkesda dulu atau bagaimana? Dari puskesmas melakukan scriining baru lalu ke labkesda nanti akan di tindaklanjuti terkait puskesmas puger.

5. Himpsi mulai bergabung juni : alur di himpsi sama yang disampaikan dinkes dan dp3akb , menggali data psikologi dari catin , sebetulnya waktu yang diberikan sangat terbatas. Evaluasi tehknis akan dibahas dengan dp3akb, kami membutuhkan laporan kesehatan sehingga pentingnya standarisasi format , ingin melakukan edukasi terhadap keluarga dan keterbatasan waktu sehingga banyak yang belum tersampaikan, yang terpenting kebutuhan apa saja dari psikoligi yang data-data dibutuhkan oleh pengadilan agama? Urgent menghadirkan orang tua untuk mengedukasi orang tua juga. Tambahan dari bu panca poin-poin hal yang penting dari catin dari informasi sebagai pertimbangan hakim, kekwatiran
6. Garwita : dalam memberikan pertimbangan rekomendasi kemampuan berpikir catin, faktor kemandirian dan kematangan emosi ke 3 faktor ini kebutuhan minimal yang dibutuhkan pada saat menikah namun sebenarnya perlu banyak indicator yang harus dipertimbangkan .
7. Dalam membuat laporan rekomendasi catin maksimal 5 catin jika lebih dari 5 maka penulisan rekomendasi lebih dari 1 minggu.
8. TA bkkbn : dalam pencegahan perkawinan anak perlu menambahkan dinas Pendidikan dan DPMD . regulasi yang ada dalam pencegahan perkawinan anak perlu juga diikuti peningkatan Pendidikan vokasi . usulan bukan hanya bersifat bantuan dan dibarengi bantuan namun juga ketrampilan hidup.sehingga kecukupan hidup persoalan siklus kehidupan. DPMD adanya pelatihan peningkatan kompetensi remaja di desa
9. Ketua Pengadilan Agama : perkara dispensasi kawin bisa juga melalui ecourt dengan catatan persyaratan terpenuhi. Namun kami juga akan memeriksa mengapa ada perbedaan data yang ada di Pengadilan Agama dan DP3AKB karena butuh penyamaan persyaratan.

Foto – Foto Kegiatan :



	BIDANG : Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan			
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : 2.08.02 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
	Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0001 Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaa perempuan kewenangan kabupaten/kota			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 55.386.000	Rp. 53.865.500	83,52%
	Outcome :			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak, di mana mereka bisa belajar dan tumbuh tanpa rasa takut.</li> <li>o Meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk guru, orang tua, dan siswa, tentang dampak buruk bullying terhadap kesehatan mental dan fisik anak.</li> <li>o Membentuk program dukungan bagi korban bullying dan intervensi bagi pelaku untuk mencegah pengulangan perilaku tersebut.</li> </ul>			
	Output :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Mampu menemu kenali lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak, di mana mereka bisa belajar dan tumbuh tanpa rasa takut.</li> <li>o Mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk guru, orang tua, dan siswa, tentang dampak buruk bullying terhadap kesehatan mental dan fisik anak.</li> <li>o Mampu mengimplementasikan dalam program dukungan bagi korban bullying dan intervensi bagi pelaku untuk mencegah pengulangan perilaku tersebut.</li> </ul>				
Pelaksanaan Kegiatan :				
Tempat : 1. Aula SMK Pancasila 2. Aula SMKN 1 Ambulu 3. Aula Balai Desa Plalangan				
Hari/Tanggal : 1. 19 September 2024 2. 02 Oktober 2024				
Jam : 09.00 WIB - Selesai				
Peserta : 1. Siswa SMK Pancasila				

2. Siswa SMAN 1 Ambulu
3. Perangkat desa Plalangan

Narasumber : 1. Bupati  
2. Lembaga Masyarakat  
3.

Notulensi ( laporan kegiatan )

- a. Mampu menemu kenali lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak, di mana mereka bisa belajar dan tumbuh tanpa rasa takut.
- b. Mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk guru, orang tua, dan siswa, tentang dampak buruk bullying terhadap kesehatan mental dan fisik anak.
- c. Mampu mengimplementasikan dalam program dukungan bagi korban bullying dan intervensi bagi pelaku untuk mencegah pengulangan perilaku tersebut.

Foto – Foto Kegiatan :





	BIDANG : Perlindungan Anak			
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
	Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Memerlukan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 100.075.000	Rp. 99.975.000	99,9%
	Outcome :			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta Memahami Hak-hak Anak dan Kekerasan pada Anak</li> <li>2. Peserta memahami Alur Dispensasi Kawin di Kabupaten Jember sesuai dengan PERMA No 5 Tahun 2019 dan Seluruh Stakeholder mendukung Pencegahan Perkawinan Anak</li> </ol>			
	Output :			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konvensi Hak Anak 1 Kali</li> <li>2. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor</li> <li>3. Pelaksanaan KIE Pencegahan</li> </ol>			

Pelaksanaan Kegiatan :	
Tempat	: 1. Aula Bawah Pemkab Jember 2. Hotel Royal Jember 3. Aula PB Sudirman
Hari/Tanggal	: 1. Rabu, 21 Februari 2024 2. Kamis, 16 Mei 2024 3. Rabu, 21 Februari 2024
Jam	: 09.00 WIB - Selesai
Peserta	: 1. Wakil Bupati Jember 2. Kanit Perlindungan Perempuan Anak Polres Jember 3. Pengadilan Agama Jember 4. Kemenag Jember 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember 7. Lembaga Perlindungan Anak Jatim 8. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Jember 9. Ketua TP PKK Kecamatan Se-Kabupaten Jember 10. Kepala KUA Se-Kabupaten Jember 11. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Se-Kabupaten Jember 12. Perwakilan Penyuluh Agama Islam masing-masing Kecamatan 1 orang 13. Kasi Pelayanan Umum dan Kaur Kesra untuk 52 Desa Kampung KB 14. Camat dan Kepala Desa
Narasumber	: 1. Kementerian Agama Kabupaten Jember 2. Pengadilan Agama Jember 3. Kepolisian Resor Jember (Polres Jember) 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember 5. Psikolog Garwita Institute Jember 6. Fasilitator Daerah DRPPA
Notulensi ( laporan kegiatan )	
<p>5. Kegiatan KHA diberikan pada Kasi Pelayanan Umum dan Kaur Kesra untuk 52 Desa yang mempunyai Kampung KB Dengan di berikannya materi KHA pada tenaga pelayanan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak dan memberikan anggaran untuk memfasilitasi anak, sehingga hak hak anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak dapat terfasilitasi mulai tingkat desa.</p> <p>6. Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama lintas sektor ini menghadirkan stakeholder yang ada di lini depan untuk menyamakan persepsi dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Adapun yang dihadirkan dalam kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas sektor ini adalah :</p> <p>a. Wakil Bupati Jember</p>	

- b. Kanit Perlindungan Perempuan Anak Polres Jember
  - c. Pengadilan Agama Jember
  - d. Kemenag Jember
  - e. Lembaga Perlindungan Anak Jatim
  - f. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
  - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember
  - h. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Jember
  - i. Ketua TP PKK Kecamatan Se-Kabupaten Jember
  - j. Kepala KUA Se-Kabupaten Jember
  - k. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Se-Kabupaten Jember
  - l. Perwakilan Penyuluh Agama Islam masing masing Kecamatan 1 Orang
7. Pelaksanaan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dengan menghadirkan Kepala OPD, Camat Se Kabupaten Jember, MUI, Lembaga Masyarakat untuk Deklarasi Pencegahan Perkawinan Anak

Foto – Foto Kegiatan :







21 Feb 2024 12.16.56  
1 Jalan Sudarman  
Jemberlor  
Kecamatan Patrang  
Kabupaten Jember  
Jawa Timur



21 Feb 2024 11.48.13  
1 Jalan Sudarman  
Jemberlor  
Kecamatan Patrang  
Kabupaten Jember  
Jawa Timur

	BIDANG : Perlindungan Anak			
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
	Kegiatan : 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : 2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 100.000.000	Rp. 98.681.500	98,68%
	Outcome :			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gugus Tugas KLA dapat mengisi Evaluasi Mandiri KLA dengan benar.</li> <li>2. Peserta dapat memahami Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor</li> <li>3. Peserta memahami Dampak Perkawinan Anak</li> </ol> Peningkatan Kapasitas Forum Anak Jember			
	Output :			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Koordinasi KLA</li> <li>2. Peringatan Hari Anak Nasional</li> <li>3. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak</li> <li>4. Peningkatan Kapasitas Forum Anak Jember</li> </ol>			
	Pelaksanaan Kegiatan :			
	Tempat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aula Bawah Pemkab Jember</li> <li>2. Tanoker Ledokombo</li> <li>3. Kecamatan Ajung, Kecamatan Jenggawah, Kecamatan Puger Kecamatan Bangsalsari</li> <li>4. Aula DPPPAB Jember</li> </ol>		
	Hari/Tanggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rabu, 13 November 2024</li> <li>2. Rabu, 21 Februari 2024</li> <li>3. Senin, 9 September 2024 dan Jumat, 13 September 2024</li> <li>4. Minggu, 17 November 2024</li> </ol>		
	Jam	: 09.00 WIB - Selesai		
	Peserta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Jember</li> <li>2. Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>3. Ketua TP PKK dan Wakil TP PKK Kabupaten Jember</li> <li>4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan</li> </ol>		

	<p style="text-align: center;">Keluarga Berencana Kabupaten Jember</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Anggota Himpaudi se-kecamatan Ledokombo</li> <li>6. Anggota IGTKI se-kecamatan Ledokombo</li> <li>7. Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa Se-wilayah Kecamatan Ledokombo</li> <li>8. Ketua TP PKK Kabupaten Jember dan Wakil TP PKK Kabupaten Jember</li> <li>9. Camat dan Kepala Desa Sewilayah 4 Kecamatan</li> <li>10. Ketua TP PKK Kecamatan dan Ketua TP PKK Desa Sewilayah 4 Kecamatan</li> <li>11. Babinsa dan Bhabinkamtibmas sewilayah 4 Kecamatan Kaur</li> <li>12. Kesra sewilayah 4 Kecamatan</li> <li>13. Perwakilan UNICEF</li> <li>14. Forum Anak Jember</li> <li>15. Forum Anak Desa Kesilir, Pontang dan Patempuran</li> </ol> <p>Narasumber : 1. Perwakilan DP3AK Provinsi Jatim</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak RI</li> <li>3. Kabid Perlindungan Anak</li> <li>4. Perwakilan UNICEF</li> </ol> <p>Notulensi ( laporan kegiatan )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Rakor GT KLA diberikan pada Anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Jember. Dengan diberikannya materi Pembinaan Evaluasi Mandiri KLA pada Anggota Gugus Tugas diharapkan dapat memberikan dan kemudahan dalam pengisian Evaluasi Mandiri KLA sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal.</li> <li>2. Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Jember yang terselenggara di Tanoker Ledokombo bertepatan dengan Kunjungan Ibu Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Adapun yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>b. Ketua TP PKK Jember dan Wakil Ketua TP PKK Jember</li> <li>c. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember</li> <li>d. Anggota Himpaudi se-kecamatan Ledokombo</li> <li>e. Anggota IGTKI se-kecamatan Ledokombo</li> <li>f. Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa Se-wilayah Kecamatan Ledokombo</li> </ol> </li> <li>3. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di 4 Kecamatan yakni Kecamatan Jenggawah, Ajung, Puger dan Bangsalsari. Kegiatan ini dihadiri sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua TP PKK Kabupaten Jember dan Wakil TP PKK Kabupaten Jember</li> <li>b. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember</li> <li>c. Camat dan Kepala Desa Sewilayah 4 Kecamatan</li> </ol> </li> </ol>
--	--

- d. Ketua TP PKK Kecamatan dan Ketua TP PKK Desa Sewilayah 4 Kecamatan
  - e. Babinsa dan Bhabinkamtibmas sewilayah 4 Kecamatan
  - f. Kaur Kesra sewilayah 4 Kecamatan
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak yang dilaksanakan di Aula DPPPAB yang di hadiri oleh :
- a. Perwakilan UNICEF
  - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember
  - c. Forum Anak Jember
  - d. Forum Anak Desa Kesiir, Pontang, Patempuran

Foto – Foto Kegiatan :







	BIDANG : Perlindungan Anak			
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
	Kegiatan : 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : 2.08.07.2.03.0004 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat kabupaten/kota			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 34.450.000	Rp. 31.467.000	91,34%
	Outcome : 1. Peserta bisa menjadi mediator dalam dukungan psikologis awal korban perempuan dan anak Peserta memahami tentang 4 kekerasan yang terjadi pada anak			
	Output : 1. Bimtek Dasar-dasar Konseling Awal 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlidnyngan Khusus			
	Pelaksanaan Kegiatan :			
	Tempat	: 1. UPA Agroteknologi Universitas Jember 2. Hotel Luminor Jember		
	Hari/Tanggal	: 1. Jumat-Sabtu, 13-14 September 2024		

	2. Rabu, 06 November 2024
Jam	: 09.00 WIB - Selesai
Peserta	: 1. Wakil Bupati Jember 2. Kepala DP3AK Provinsi Jatim dan Staf 3. Perwakilan BKKBN Jatim 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember 5. Pramusaji Balai KB se-kabupaten Jember 6. Psikolog Himpsi 7. Kodim 0824 Jember 8. Kanit PPA Polres Jember 9. Psikolog Forensik Polda Jatim 10. Kanit Reskrim Polsek Sekabupaten Jember 11. Danramil Sekabupaten Jember
Narasumber	: 1. Psikolog Himpsi 2. Psikolog Forensik Polda Jatim 3. Kanit PPA Polres Jember 4. Komandan Distrik militer 0824 Jember
Notulensi ( laporan kegiatan )	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Bimtek Tahap Perkembangan Anak dan Dasar-dasar Konseling diberikan pada Pramusaji Balai Penyuluh KB Sekabupaten Jember. Dengan di berikannya materi Bimtek Dasar-dasar konseling pada tenaga pramusaji Balai Penyuluh Keluarga Berencana sekabupaten Jember diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak dan memberikan dukungan psikologis awal pada korban perempuan dan anak yang melapor terkait kekerasan di balai penyuluh keluarga berencana.</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan dan Layanan Khusus ini menghadirkan stakeholder yang ada di lini depan untuk menyamakan persepsi dalam rangka memberikan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak. Adapun yang dihadirkan dalam kegiatan ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kanit PPA Polres Jember</li> <li>b. Komandan Distrik Militer 0824 Jember</li> <li>c. Kanit Reskrim Polsek Sekabupaten Jember</li> <li>d. Danramil Sekabupaten Jember</li> </ol> </li> </ol>	

Foto – Foto Kegiatan :



	BIDANG : UPTD PPA			
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
	Kegiatan : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 118.024.800	Rp. 94.117.467	%
	Outcome :			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta Memahami cara penanganan kasus kekerasan bullying pada anak</li> <li>2. Peserta dapat koordinasi dan sinergi bersama dalam penanganan kasus bullying di sekolah</li> </ol> <p>Seluruh Stakeholder mendukung kolaborasi dan sinergi penanganan kasus bullying pada anak</p>			
	Output :			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor</li> <li>2. Pelaksanaan Penanganan kasus secara bersama</li> <li>3. Gelar Kasus Pada Anak</li> </ol>			
	Pelaksanaan Kegiatan :			
	Tempat : Aula DP3AKB			
	Hari/Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024			
	Jam : 09.00 WIB - Selesai			
	Peserta : 1. Kemenag 2. Bakorwil 3. Kabid Bidang PP 4. Kabid Bidang PA 5. Peksos 6. Bapas Jember 7. MIN 1 8. MIN 3 9. MI Miftahul Huda Curah Malang Rambipuji 10. MTS 1 11. MTS 2 12. SD Darus Sholah 13. SD Al Baitul AMIN 02 14. SDN Jember Lor 1			

15. SDN Jember Lor 3
16. SMPN 2 Jember
17. SMPN 2 Ambulu
18. SMPN 3 Jember
19. SMPN 2 Jombang
20. SMPN 7 Jember
21. SMPN 1 Arjasa
22. SMKN 1 Jember
23. SMKN 3 Jember
24. SMAN 4 Jember
25. SMAN Kalisat
26. SMAN Plus Sukowono
27. MAN 1 Jember
28. MAN 2 Jember
29. SMKN 5 Jember
30. SLBN Jember
31. FAJ
32. PIK-R
33. RRI
34. MNCTV
35. K-RADIO
36. RADAR JEMBER
37. SMAN Kencong
38. Komisi D DPRD

Narasumber : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember  
 2. Kanit PPA Polres Jember  
 3. Psikolog Garwita Institute Jember

Notulensi ( laporan kegiatan )

8. Nama Giat :

Gelar Kasus Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kasus Perundungan/Bullying pada Anak

9. Hari/Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024

10. Tempat : Aula Bina Kencana DP3AKB

11. Pelaksana : UPTD PPA DP3AKB

12. Hasil kegiatan :

Pemahaman cara penanganan ketika terjadinya kasus bullying di tingkat sekolah

Memahami pencegahan dan menangani kasus bullying dengan menggunakan pendekatan yg memperhatikan psikologis anak dan remaja

Memahami aturan-aturan terkait kategori bullying yg dapat dilakukantindakan hukum ata dikenai sanksi hukum

Menghimbau agar segera dapat terbentuknya tim TPPK di setiap sekolah

Foto – Foto Kegiatan :





BIDANG : UPTD PPA			
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian %
1	Program : 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan		
	Kegiatan : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 117.351.000	Rp. 82.520.181 %
	Outcome :		
	Output :		
<p>Pelaksanaan Kegiatan :</p> <p>Tempat : Aula Bawah Pemkab Jember</p> <p>Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juli 2024</p> <p>Jam : 09.00 WIB - Selesai</p> <p>Peserta : 1. Kabid PA DP3AKB 2. Kabid PP DP3AKB 3. Ketua Satgas PPKS UNEJ 4. Ketua Satgas PPKS UNMUH 5. Ketua Satgas PPKS POLTEK JEMBER 6. Ketua Satgas PPKS UIN KHAS 7. Ketua Satgas PPKS UIJ 8. Ketua Satgas PPKS UNIPAR 9. Kepala Kecamatan Sumpalsari 10. Kepala Kecamatan Kaliwates 11. Kepala Kecamatan Patrang 12. Kepala Kelurahan Sumpalsari 13. Kepala Kelurahan Gebang</p>			

14. Kepala Kelurahan Jember Kidul
15. Kepala Desa Glundengan
16. Kepala Desa Lengkong
17. Kepala Desa Sidomukti
18. Kepala Desa Sukowono
19. Kepala Desa Subo
20. Kepala Desa Rambipuji
21. Kepala Desa Bangsalsari
22. Kepala Desa Arjasa
23. Kepala Desa Panti
24. Kepala Desa Kertonegoro
25. Kepala Desa Gumuksari
26. Kepala Desa Sidomulyo
27. Kepala Desa Kasiyan
28. Kepala Desa Kencong
29. Kepala Desa Puger Kulon
30. Kepala Desa Ledokombo
31. RSD dr.Soebandi
32. Puskesmas Kaliwates
33. Puskesmas Patrang
34. Puskesmas Ajung
35. Puskesmas Pakusari
36. Puskesmas Tempurejo
37. MNC TV
38. Radar Jember
39. RRI Jember
40. K-Radio

Narasumber : 1. Hakim Pengadilan Agama Jember  
 2. Kanit PPA Polres Jember  
 3. Lembaga Bantuan Hukum Takawida

Notulensi (Laporan Kegiatan )

1. Kegiatan Pemateri Hakim Pengadilan Agama menyampaikan Masalah kart salah satu bagian yang terbilang parsial atau sedikit dibanding permasalahan yang ada di pengadilan agama;  
 Salah satu terjadinya perceraian adalah terjadinya pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus. dianggap sebagai pasal karet;  
 Pada tahun 2022, orang yang bercerai dengan alasan perselisihan harus dibarengi dengan pisahnya 6 bulan berturut turut;  
 Pada tahun 2023, penyempurnaan dari tahun 2022, disamping harus berpisah minimal 6 bulan kecuali kasus KDRT;

	<p>Mahkamah Agung memberikan perhatian khusus terhadap kasus KDRT: dimana setiap gugatan dengan alasan KDRT tidak menunggu 6 bulan, hal tersebut bisa lebih cepat jika pihak bersangkutan memberikan bukti atau alibi seperti (visum);</p> <p>2. Pemateri dari Kanit PPA Polres menyampaikan Mekanisme pelaporan KDRT sama dengan kasus biasanya namun mengutamakan mediasi;  Jaminan yg diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, &amp; melindungi korban KDRT;  Mekanisme Perintah Perlindungan yakni Kepolisian wajib Memberikan perlindungan, sementara pada korban, meminta surat penetapan, perintah perlindungan dari pengadilan, melakukan penyelidikan &amp; penyidikan;</p> <p>3. Pemateri dari LBH Takawida menyampaikan Hal-Hal Yang Dapat Dilakukan Ketika Mengalami KDRT Pelaporan adalah Korban dapat melaporkan kejadian KDRT kepada pihak berwenang seperti kepolisian atau Lembaga terkait, Perlindungan Hukum. Terdapat Undang-Undang yang melindungi korban KDRT, seperti Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dukungan Psikologis. Konseling dan terapi dapat membantu korban untuk pulih dari trauma, Dukungan Sosial. Kelompok dukungan dan komunitas dapat memberikan bantuan moral dan praktis bagi korban;</p> <p>Cara-Cara Penanggulangan KDRT yaitu Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agama, Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga, Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, kedua belah pihak harus sama- sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan, Membaca buku-buku yang berisi cerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang baik.</p> <p>Foto – Foto Kegiatan :</p>
--	--







BIDANG : UPTD PPA				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
	Kegiatan : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan			

Perlindungan Peremouan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota			
Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 43.936.000	Rp. 13.318.300	93,59 %
Outcome : Dana yang Dibutuhkan			
Output : Penyampaian Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kasus Anak			
Pelaksanaan Kegiatan :			
Tempat	: Ruang Kepala Dinas DP3AKB		
Hari/Tanggal	: Jumat, 11 Oktober 2024		
Jam	: 13.00 WIB - Selesai		
Peserta	: 1. Kabid Perlindungan Anak DP3AKB 2. Kepala UPTD PPA 3. Kanit PPA Polres Jember 4. Kepsek & Waka Kesiswaan SD Al Baitul Amin 02 5. Kabid Pembinaan dan Pendidikan SD Dispendik 6. Pengawas Pendidikan Kec. Kaliwates 7. 3 orang Psikolog Klinis Garwita Institute 8. 1 orang Psikolog Klinis RSD Soebandi (Hadir melalui zoom meeting) 9. Penasihat Hukum Ortu Anak Perempuan 10. Orang tua 1 Anak laki-laki 11. Peksos 12. Ketua GPP 13. Ketua Kopri PMII Jember		
Notulensi ( laporan kegiatan )			
1. Agenda Kegiatan adalah Penyampaian Hasil Pemeriksaan dari masing-masing Psikolog yg memeriksa secara garis besar untuk menandakan terminasi kasus yg dilakukan UPTD PPA			
2. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan hasil pendampingan pemeriksaan psikolog			
3. Kemudian dilanjutkan dengan tanggapan atau pertanyaan dari masing-masing orang tua atau yg mewakilinya			
4. Peserta yg memiliki hak bicara hanya orang tua yg bersangkutan atau penasihat hukum dan Psikolog telah disampaikan dalam tata tertib jalannya diskusi			

5. Setelah penyampaian hasil selesai, maka semua kebijakan dan keputusan diserahkan kepada sekolah
6. Pihak UPTD PPA akan tetap memberikan pendampingan layanan psikolog kepada anak-anak yg belum diasesmen oleh psikolog
7. Akan dilakukan sinergi kasus untuk melihat psikososial masing-masing anak dgn Peksos setelah semuanya reda
8. Akan dilakukan koordinasi dgn sekolah agar segera melaksanakan sosialisasi anti kekerasan dan pembentukan SRA di sekolah

Foto – Foto Kegiatan :



BIDANG : SEKRETARIAT				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 52.999.600	Rp. 49.602.700	93,59 %
	Outcome : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 52.999.600		
	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		
	Pelaksanaan Kegiatan : Tempat : Dinas PPPAKB Jember			

Hari/Tanggal : Januari-Desember 2024

Jam : -

Peserta : Pegawai DP3AKB

Narasumber : -

Notulensi ( laporan kegiatan )

Foto – Foto Kegiatan :





	BIDANG : SEKRETARIAT			
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 55.974.400	Rp. 40.651.500	72,63 %
	Outcome : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 55.974.400		
	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		
	Pelaksanaan Kegiatan : Tempat : Dinas PPPAKB Jember Hari/Tanggal : Januari-Desember 2024 Jam : - Peserta : Pegawai DP3AKB Narasumber : - Notulensi ( laporan kegiatan			
Foto – Foto Kegiatan :				
				



BIDANG : SEKRETARIAT

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 150.635.000	Rp139.992.970	92,94%

Outcome : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 150.635.000		
Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		
<p>Pelaksanaan Kegiatan :</p> <p>Tempat : Dinas PPPAKB Jember</p> <p>Hari/Tanggal : Januari-Desember 2024</p> <p>Jam : -</p> <p>Peserta : Pegawai DP3AKB</p> <p>Narasumber : -</p> <p>Notulensi ( laporan kegiatan )</p>			
<p>Foto – Foto Kegiatan :</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">   </div>			



BIDANG : SEKRETARIAT												
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%								
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 70.153.758	Rp. 66.760.173	95,16 %								
	Outcome : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 70.153.758										
	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan										
	Pelaksanaan Kegiatan :											
Tempat : Dinas PPPAKB Jember												
Hari/Tanggal : Januari-Desember 2024												
Jam : -												
Peserta : Pegawai DP3AKB												
Narasumber : -												
Notulensi ( laporan kegiatan )												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Belanja Tagihan Telepon 12 bulan</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp 3.600.000</td> </tr> <tr> <td>2. Belanja Tagihan Air 12 bulan</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp 1.020.000</td> </tr> <tr> <td>3. Belanja Tagihan Listrik 12 bulan</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp 62.140.173</td> </tr> </table>				1. Belanja Tagihan Telepon 12 bulan		Rp 3.600.000	2. Belanja Tagihan Air 12 bulan		Rp 1.020.000	3. Belanja Tagihan Listrik 12 bulan		Rp 62.140.173
1. Belanja Tagihan Telepon 12 bulan		Rp 3.600.000										
2. Belanja Tagihan Air 12 bulan		Rp 1.020.000										
3. Belanja Tagihan Listrik 12 bulan		Rp 62.140.173										

BIDANG : SEKRETARIAT				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 28.000.000	Rp. 27.897.400	99,63 %
	Outcome : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 28.000.000		
	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan		
	Pelaksanaan Kegiatan : Tempat : Dinas PPPAKB Jember Hari/Tanggal : Januari-Desember 2024 Jam : - Peserta : Pegawai DP3AKB Narasumber : - Notulensi ( laporan kegiatan )  1. Prosesi Pengukuhan Forum Anak Jember (FAJ) oleh Wakil Bupati Jember 2. Launching Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Kabupaten Jember 3. Penyerahan Hasil Rekomendasi Musrenbang Perempuan, Anak, Lansia, Disabilitas dan Inklusi oleh Peserta Musrenbang 4. Fasilitasi kegiatan peringatan hari-hari besar nasional			

Foto – Foto Kegiatan :






BIDANG : SEKRETARIAT				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 59.942.200	Rp. 55.136.220	91,98 %
	Outcome : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 59.942.200		
	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Unit		
	Pelaksanaan Kegiatan : Tempat : Dinas PPPAKB Jember Hari/Tanggal : Januari-Desember 2024 Jam : -			

	<p>Peserta : Pegawai DP3AKB</p> <p>Narasumber : -</p> <p>Notulensi ( laporan kegiatan )</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertamax Kendaraan Jabatan : Rp 43.278.220</li><li>2. Service Berkala : Rp 6.790.000</li><li>3. Biaya Pajak kendaraan Bermotor (Roda 4) : Rp 1.389.000</li></ol>

BIDANG : SEKRETARIAT				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 101.956.800	Rp. 87.983.787	86,30 %
	Outcome : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 101.956.800		
	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit		
	Pelaksanaan Kegiatan : Tempat : Dinas PPPAKB Jember Hari/Tanggal : Januari-Desember 2024 Jam : - Peserta : Pegawai DP3AKB Narasumber : - Notulensi ( laporan kegiatan )  1. Pertamax Kendaraan Operasional : Rp 32.228.338 2. Pertamina Dex Kendaraan Operasional : Rp 19.828.549 3. Service Berkala : Rp 6.115.000 4. Biaya Pajak kendaraan Bermotor (Roda 4) : Rp 24.006.900			

	BIDANG : SEKRETARIAT			
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 59.935.000	Rp. 23.538.000	39,27 %
	Outcome : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 59.935.000		
	Output : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan		
	Pelaksanaan Kegiatan : Tempat : Dinas PPPAKB Jember Hari/Tanggal : Januari-Desember 2024 Jam : - Peserta : Pegawai DP3AKB Narasumber : - Notulensi ( laporan kegiatan )			
Foto – Foto Kegiatan :				
				



BIDANG : SEKRETARIAT				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 1.933.019.739	Rp. 1.635.336.329	84,60%
	Outcome : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 1.933.019.739		
	Output : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	12 Laporan		
	<p>Pelaksanaan Kegiatan :</p> <p>Tempat : Dinas PPPAKB Jember</p> <p>Hari/Tanggal : Januari-Desember 2024</p> <p>Jam : -</p> <p>Peserta : Penyuluh KB, Kader IMP, Poktan, TPK, Mitra kerja terkait</p> <p>Narasumber : -</p> <p>Notulensi ( laporan kegiatan )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengetahuan kader dalam pengelolaan Poktan</li> <li>2. Peningkatan pengetahuan IMP tentang mekanisme pencatatan dan pelaporan</li> <li>3. Meningkatkan dukungan dari mitra kerja terkait</li> <li>4. Meningkatkan pengetahuan kader tentang pengasuhan 1000 HPK</li> </ol>			
<p>Foto – Foto Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upah Pramusaji dan Tenaga Keamanan : Rp 600.000.000</li> <li>2. Belanja Air balai kb : Rp 3.551.870</li> <li>3. Belanja Listrik Balai KB : Rp 36.485.559</li> </ol>				







BIDANG : SEKRETARIAT				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana			
	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 2.549.708.650,-	Rp. 2.361.633.174,-	92,62%
	Outcome : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 2.549.708.650,-		
	Output : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	11 Laporan		
	Pelaksanaan Kegiatan :			
Tempat : Dinas PPPAKB Jember				
Hari/Tanggal : Januari-Desember 2024				

Jam : -

Peserta : -

Narasumber : -

Notulensi ( laporan kegiatan )

1. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gendung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp. 1.352.591.100,-
2. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp. 19.814.474,-
3. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp. 52.549.100,-
4. Belanja Modal Rp. 816.734.300,-

Foto – Foto Kegiatan :







BIDANG : SEKRETARIAT				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)			
	Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan 'Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 306.000.000,-	Rp. 297.920.000,-	97,36%
	Outcome : Dana yang Dibutuhkan	Rp. 306.000.000,-		
	Output : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1 Laporan		
	Pelaksanaan Kegiatan : Tempat : Dinas PPPAKB Jember Hari/Tanggal : Januari-Desember 2024 Jam : - Peserta : - Narasumber : - Notulensi ( laporan kegiatan )  1. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) BKB KIT Rp. 297.920.000,-			
Foto – Foto Kegiatan :				





#### **D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan

anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember berjumlah 86 orang, dengan jumlah 7 Program, 21 Kegiatan, dan 41 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 31,873,363,102,- untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	102%	90%	Efisien
Meningkatnya Kualitas Keluarga	106%	98%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Keluarga dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

## **E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

Analisis capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
<b>Sasaran 1 Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana</b>						
Indikator 1.1 Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR	<b>102%</b>					
Rata rata capaian	<b>102%</b>					
<b>Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Keluarga</b>						
Indikator 1.1 Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga )	106%					
Rata rata capaian	106%					
<b>Sasaran 3 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah</b>	100 %					
Indikator Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %					
Rata rata Capaian	102 %					

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

### Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 102 %,

- Penyebab keberhasilan antara lain dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKB dari pusat sangat membantu dalam keberhasilan pelayanan keluarga berencana.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah masih rendahnya dukungan anggaran dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung program Bangga Kencana.
- Rencana perbaikan kedepan apa mengusulkan tambahan anggaran dari DAU untuk pelayanan keluarga berencana sehingga tidak tergantung pada anggaran pusat.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain penanganan keluarga berencana secara serentak.

#### Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Keluarga

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga ) mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- Penyebab keberhasilan antara lain dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOPPA dari pusat sangat membantu dalam keberhasilan pelayanan keluarga berencana.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah masih rendahnya dukungan anggaran dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung program Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan perempuan.
- Rencana perbaikan kedepan apa mengusulkan tambahan anggaran dari DAU untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak sehingga tidak tergantung pada anggaran pusat.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain penanganan perlindungan perempuan dan anak.

#### Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- Penyebab keberhasilan antara lain dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOPPA dari pusat sangat membantu dalam keberhasilan pencapaian kinerja dengan baik.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah masih rendahnya dukungan anggaran dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung program Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan perempuan.
- Rencana perbaikan kedepan apa mengusulkan tambahan anggaran dari DAU untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak sehingga tidak tergantung pada anggaran pusat.

## F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 31.873.363.102 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 29.731.875.732 terealisasi sebesar 93 %

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2024**

<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PROSENTAS E</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6,949,951,513.00</b>	<b>6,305,765,481</b>	<b>90.73</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6,090,609,755.00</b>	<b>5,525,990,731</b>	<b>90.73</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,204,374,535.00	4,672,236,538	89.78

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	886,235,220.00	853,754,193	96.33
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>339,680,000.00</b>	<b>311,750,000</b>	<b>91.78</b>
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian	339,680,000.00	311,750,000	91.78
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>259,609,000.00</b>	<b>230,247,170</b>	<b>88.69</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,999,600.00	49,602,700	93.59
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55,974,400.00	40,651,500	72.63
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,635,000.00	139,992,970	92.94
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>98,153,758.00</b>	<b>94,657,573</b>	<b>96.44</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	70,153,758.00	66,760,173	95.16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28,000,000.00	27,897,400	99.63
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>161,899,000.00</b>	<b>143,120,007</b>	<b>88.40</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59,942,200.00	55,136,220	91.98
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101,956,800.00	87,983,787	86.30
<b>PROGRAM PENGARASUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>130,051,100.00</b>	<b>124,278,190</b>	<b>95.56</b>
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>49,338,700.00</b>	<b>47,655,190</b>	<b>96.59</b>
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	49,338,700.00	47,655,190	96.59

<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>25,326,400.00</b>	<b>22,757,500</b>	<b>89.86</b>
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	25,326,400.00	22,757,500	89.86
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>55,386,000.00</b>	<b>53,865,500</b>	<b>97.25</b>
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	55,386,000.00	53,865,500	97.25
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>220,190,800.00</b>	<b>148,201,481</b>	<b>67.31</b>
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>35,923,000.00</b>	<b>30,004,000</b>	<b>83.52</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	35,923,000.00	30,004,000	83.52
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>140,331,800.00</b>	<b>104,879,181</b>	<b>74.74</b>
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	22,980,800.00	22,450,000	97.69
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	117,351,000.00	82,429,181	70.24

<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>43,936,000.00</b>	<b>13,318,300</b>	<b>30.31</b>
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	43,936,000.00	13,318,300	30.31
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>352,549,800.00</b>	<b>308,003,515</b>	<b>87.36</b>
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Kabupaten/Kota</b>	<b>100,075,000.00</b>	<b>99,975,000</b>	<b>99.90</b>
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA	100,075,000.00	99,975,000	99.90
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>118,024,800.00</b>	<b>77,880,015</b>	<b>65.99</b>
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	118,024,800.00	77,880,015	65.99
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>134,450,000.00</b>	<b>130,148,500</b>	<b>96.80</b>
Pengembangan Lembaga Penyedia LayananAMPK tingkat Kabupaten/kota	34,450,000.00	31,467,000	91.34
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	100,000,000.00	98,681,500	98.68
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN</b>			

<b>PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>727,197,500.00</b>	<b>668,928,000</b>	<b>91.99</b>
<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>214,862,500.00</b>	<b>201,190,000</b>	<b>93.64</b>
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	214,862,500.00	201,190,000	93.64
<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota</b>	<b>512,335,000.00</b>	<b>467,738,000</b>	<b>91.30</b>
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	59,935,000.00	23,538,000	39.27
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	272,400,000.00	264,200,000	96.99
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	180,000,000.00	180,000,000	100.00
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>11,887,419,389.00</b>	<b>10,651,224,274</b>	<b>89.60</b>
<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>2,816,435,739.00</b>	<b>2,463,264,329</b>	<b>87.46</b>
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100,000,000.00	99,943,500	99.94
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	457,185,000.00	452,219,500	98.91

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1,933,019,739.00	1,635,336,329	84.60
Pengendalian Program KKBPK	326,231,000.00	275,765,000	84.53
<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>773,949,000.00</b>	<b>744,000,000</b>	<b>96.13</b>
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	29,949,000.00		0.00
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	744,000,000.00	744,000,000	100.00
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7,292,362,650.00</b>	<b>6,552,680,945</b>	<b>89.86</b>
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	92,700,000.00	18,315,000	19.76
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4,603,605,000.00	4,126,425,771	89.63
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2,549,708,650.00	2,361,633,174	92.62
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46,349,000.00	46,307,000	99.91
<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>1,004,672,000.00</b>	<b>891,279,000</b>	<b>88.71</b>
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3,841,000.00	3,841,000	100.00
Pembinaan Terpadu Kampung KB	1,000,831,000.00	887,438,000	88.67

<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>11,606,003,000.0 0</b>	<b>11,525,474,79 1</b>	<b>99.31</b>
<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>11,606,003,000.0 0</b>	<b>11,525,474,79 1</b>	<b>99.31</b>
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	306,000,000.00	297,920,000	97.36
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	50,000,000.00	49,875,000	99.75
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11,250,003,000.0 0	11,177,679,79 1	99.36
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>31,873,363,102</b>	<b>29,731,875,73 2</b>	<b>93.28</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember ... sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 2 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 2 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKB dan BOPPA dari pusat sangat membantu dalam keberhasilan pelayanan keluarga berencana, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
2. Penguatan koordinasi dengan seluruh stakeholder sangat membantu dalam mencapai target dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia secara maksimal dengan tugas pokok dan fungsi yang telah di turunkan sampai dengan staf.

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Tim TAPD menambah anggaran APBD untuk pelayanan KB dan pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Penambahan SDM

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.





2	19	04	201	02	Pengalasan Sarana Kelompok Kegiatan Kerjasama dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Kerjasama dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Utai	31	31	2,075,960,000	31	2,075,960,000	31	2,075,960,000	31	2,075,960,000	31	2,075,960,000	31	2,075,960,000						
2	19	04	201	03	Ornamen dan Pahlawan Tokoh Pengabdian keragaman dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Ornamen dan Pahlawan Tokoh Pengabdian Keragaman dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	100	100	1,500,000,000	100	1,500,000,000	100	1,500,000,000	100	1,500,000,000	100	1,500,000,000	100	1,500,000,000	100	1,500,000,000				
2	19	04	201	04	Ornamen/Pahlawan Tokoh Pahlawan/Kader Keragaman dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengabdikan Ornamen/Pahlawan Tokoh Pahlawan/Kader Keragaman dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000				
2	19	04	201	05	Perencanaan Bina Operasional bagi Pengabdian dan Pahlawan Kader Keragaman dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengabdian dan Pahlawan (Kader) Keragaman dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000				
2	19	04	201	06	Perencanaan Bina Operasional bagi Kelompok Kegiatan Kerjasama dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Kerjasama dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	kelompok	100	100	100,000,000	5625	10,835,040,000	5625	10,835,040,000	5625	10,835,040,000	5625	10,835,040,000	5625	10,835,040,000	5625	10,835,040,000				
2	19	04	201	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kerjasama dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kerjasama dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000				
2	19	04	201	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kerjasama dan Kewajjahteraan Keluarga Melalui Orang Tua, Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengabdian Keragaman Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kerjasama dan Kewajjahteraan Keluarga Melalui Orang Tua, Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengabdian Keragaman Keluarga	Laporan	12	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000				
2	19	04	201	09	Preparasi Kelengkapan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Preparasi Kelengkapan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK (tidak termasuk Kelengkapan)	Dokumen	12	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000				
2	19	04	201	10	Preparasi dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Preparasi dan Pengembangan Materi IPK (tidak termasuk Kelengkapan)	Dokumen	12	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000				
2	19	04	201	11	Advisasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advisasi dan Promosi IPK (tidak termasuk Kelengkapan)	Orang	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000				
2	19	04	201	12	Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi IPK (tidak termasuk Kelengkapan)	Orang	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000				
2	19	04	201	13	Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pelaksanaan IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Rencana Pelaksanaan IPK (tidak termasuk Kelengkapan)	Laporan	12	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000				
2	19	04	201	14	Pembinaan dan Pengawasan Kewajjahteraan Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kelengkapan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembinaan dan Pengawasan Kewajjahteraan Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kelengkapan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000				
2	19	04	201	15	<b>Pelaksanaan dan Pengabdian Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Kelengkapan dan Keterlibatan Keluarga</b>	<b>Promosi kelompok kegiatan yang melibatkan pembinan keluarga melalui pengabdian</b>																				
2	19	04	201	01	Pengabdian Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kerjasama dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan yang Mengabdikan Kegiatan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Pengabdian Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Kerjasama dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000				
2	19	04	201	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Program Kerjasama dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Program Kerjasama dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	12	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000				
2	19	04	201	03	Pelaksanaan Pengabdian Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Program Kerjasama dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengabdikan Pengabdian Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Program Kerjasama dan Kewajjahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000				
2	19	04	201	04	Promosi dan Sosialisasi Program Kerjasama dan Kewajjahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Kerjasama dan Kewajjahteraan Keluarga	Laporan	12	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000				



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2024

RPJMD

MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN
MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR BERUPA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN DASAR BERUPA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DENGAN SISTEM YANG TERINTEGRASI	MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Dan Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR
			Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga )

# RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	NAMA PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Naiknya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	<b>PROGRAM PENGASUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>						
					Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	A	30 balai KB	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		30 balai KB	49.338.700
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial; dan Ekonomi		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.326.400
					Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.363.000
					<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>						
					Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan		Semua Kecamatan,	Koordinasi dan		21 orang OPD	35.923.000

					Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kelurahan/Desa	Sikronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan		Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	22.980.800
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		117.351.000
					Penguatann dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasaan		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	43.930.000
					<b>PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK</b>						
					Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak		Semua Kecamatan, Semua	Advokasi dan Pemdampingan Perangkat		Semua Kecamatan, Semua	100.075.000

Meningkatnya	Meningkatkan pelayanan	Meningk	Angka Pemakaian Kontrasepsi	Naiknya Angka	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Kelurahan/D esa	Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA		Kelurahan/D esa	
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	118.024.800
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	34.450.000
								Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	100.000.000
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>											

Pelayanan Keluarga Berencana	dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi	atnya Pelayanan Keluarga Berencana	Modern CPR	Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	214.862.500
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	59.935.000
								Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	272.400.000
								Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	180.000.000
				<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>							

					PelaksanaanAdvokas,iK omunikas, Informasi dan Edukasi (KIE) PengendalianPenduduk dan KB SesuaiKearifan Budaya Lokal		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	Pengendalian Program KKBPK		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	326.231.000
								Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	1.933.019.739
								Pelaksanaan Mekanisme O[perasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Tapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	457.185.000
								Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/D esa	100.000.000

					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	744.000.000
								Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	29.949.000
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	92.700.000
								Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	4.603.605.000
								Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.717.505.050

							Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	46.349.000
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Intergrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	3.841,000
								Pembinaan Terpadu Kampung KB	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	1.000.831.000
					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA</b>					

					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usahan Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	306.000,000
								Orientasi Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	50.000.000

								Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	11.250.003.000
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------------------------------	----------------

Jember, 1 Februari 2024  
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Keluarga Berencana  
Kabupaten Jember



**ROERWAHJOEDI, SE**  
Pembina  
NIP. 19690628 199303 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

JL. JAWA NO. 51 ☎️ (0331) 422103 JEMBER 68117

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024**

SASARA			SUB KEGIATAN					
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Naiknya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	<b>PROGRAM PENGASUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>					
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	70 Perangkat Daerah	100%	
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial; dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial; dan Ekonomi	12 Dokumen	100 Orang	
			Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	248 Lembaga		
			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>					
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	12 Dokumen		
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	100 Orang		

Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR	Naiknya Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR	Kabupaten/Kota		Kekerasan			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	1 Layanan		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	5 Orang		
			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK</b>					
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan Pemdampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Advokasi dan Pemdampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA		37 Orang	
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		1 Orang	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/Kota		12 Lembaga	
				Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota		12 Kegiatan	
			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>					
			Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga		12 Dokumen	

					Kencana)			
			PemetaanPerkiraanPengendalianPendudukCakupanDaerah Kabupaten /Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan		
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan		
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Laporan		
			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>					
			PelaksanaanAdvokasiKomunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PengendalianPenduduk dan KB SesuaiKearifanBudayaLokal	Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	50 Laporan		
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	12 Laporan		
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Tapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Tapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan		
				Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen		
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/PetugasLapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	248 Orang		

					Pedesaan (IMP)			
				Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	248 Organisasi		
			Pengendalian dan PendistribusianKebutuhan Alat dan Obat KontrasepsisertaPelaksanaanPelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan		
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1000 Orang		
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1Unit		
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan		
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalamPelaksanaanPelayanan dan PembinaanKesertaan Ber-KB	Intergrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Intergrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dokumen		
				Pembinaan Terpadu Kampung KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	52 Laporan		
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA</b>					

			Pelaksanaan Pembangunan KeluargamelaluiPembinaanKetahanan dan KesejahteraanKeluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2 Unit		
				Orientasi Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	100 Orang		
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	5625 Orang		

Jember, 1 Februari 2024  
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Keluarga Berencana  
Kabupaten Jember



**POERWAHJOEDI, SE**  
Pembina

NIP. 19690628 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jawa Nomor 51 Sumpersari Jember Telp. 0331 - 422103  
JEMBER

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **POERWAHJOEDI, SE**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.**

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER,**

**Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.**

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

**Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

**POERWAHJOEDI, SE**  
NIP. 19690628 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR	72,5
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga )	56
		Penghargaan :Kabupaten Layak Anak	Utama
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.923.619.545	APBD
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 130.051.100	APBD
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp220.190.800	APBD, DAK
4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 352.549.800	APBD, DAK
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp727.197.500	DAK
6	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp11.887.419.389	DAK
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp. 11.606.003.000	DAK
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp31.847.031.134</b>	

BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IRU, ASEAN Eng.

Jember, 26 Januari 2024

KEPALA DINAS

Pit. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
 PERLINDUNGAN ANAK DAN  
 KELUARGA BERENCANA KAB. JEMBER



POERWAHJOEDI, SE

NIP. 19690628 199303 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA

Jalan Jawa Nomor 51 Sumpersari Jember Telp. 0331 - 422103  
JEMBER

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ZAMRONI, S.H., M.Si**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
BUPATI JEMBER,



Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jember, 26 November 2024

Pihak Pertama

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kab. Jember



MUHAMMAD ZAMRONI, S.H., M.Si  
NIP. 19680616 199303 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jawa Nomor 51 Sumbersari Jember Telp. 0331 - 422103  
JEMBER

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR	72,5
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga )	56
		Kabupaten Layak Anak	Utama
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.949.951.513	P-APBD
2 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 130.051.100	P-APBD
3 Program Perlindungan Perempuan	Rp 220.190.800	P-APBD, DAK
4 Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 352.549.800	P-APBD, DAK
5 Program Pengendalian Penduduk	Rp 727.197.500	DAK
6 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp 11.887.419.389	DAK
7 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp. 11.606.003.000	DAK
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 31.873.363.102</b>	

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER,**



**Ir.H.HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.**

Jember, 26 November 2024

Pihak Pertama

**Pt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kab. Jember**



**MUHAMMAD ZAMRONI, S.H., M.Si  
NIP. 19680616 199303 1 006**



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 065 / 05.19 / 35.09.317 / 2024**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi.
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dalam :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember  
Pada Tanggal : 1 Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Keluarga Berencana  
Kabupaten Jember



**POERWAHJOEDI, SE**  
Pembina  
NIP. 19690628 199303 1 006

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **DINAS PEMBEDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER**

Instansi : Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Tujuan : 1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan ;  
2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak ;  
3. Meningkatkan kualitas kehidupan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;  
b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;  
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR	<p>Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase.</p> <p>CPR = PUS BerKB/PUS</p>	Pelayanan KB	Bidang Dalduk dan Bidang KB KS
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga )	iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.	Pelayanan KB, KS, PA dan PP	Bidang Dalduk, Bidang KB KS, Bidang PA dan Bidang PP
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator program yang Tercapai	<p><b>Formulasi perhitungan:</b></p> $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan indikator:</b> Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan</p>	Data capaian program	Sekretariat Bidang Dalduk, Bidang KB KS, Bidang PA dan Bidang PP

		dokumen renja, dan DPA.		
--	--	----------------------------	--	--

Ditetapkan di : Jember  
Pada Tanggal : 1 Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Keluarga Berencana  
Kabupaten Jember



**POERWAHJOEDI, SE**  
Pembina  
NIP. 19690628 199303 1 006



